

**KEKUATAN POLITIK DAN KEMENANGAN PETAHANA
DALAM PEMILIHAN BUPATI WAY KANAN TAHUN 2020**

(Tesis)

Oleh

**TRI SEKTIONO
NPM.1926021002**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

KEKUATAN POLITIK DAN KEMENANGAN PETAHANA DALAM PEMILIHAN BUPATI WAY KANAN TAHUN 2020

Oleh

TRI SEKTIONO

Raden Adipati Surya merupakan petahana pada pemilihan bupati dan wakil bupati Way Kanan Tahun 2020 dengan persentase kemenangan mencapai 74,9 persen dan menjadi persentase kemenangan tertinggi pada pilkada serentak di Provinsi Lampung Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh kekuatan politik terhadap kemenangan petahana; (2) Faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan petahana pada Pilbub Way Kanan tahun 2020. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan data yang bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa informan serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peran dari kekuatan-kekuatan politik yang diteliti, yaitu media massa dan media sosial, birokrasi, organisasi masyarakat, dan modal ekonomi. Relasi kuasa yang terjadi antara kekuatan politik dengan petahana bersifat klientalisme, patronase, dan brokerisme. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kemenangan petaha yaitu: *Pertama*, faktor pandemi *covid-19* melalui politisasi terhadap Bantuan Sosial Tunai (BST); *Kedua*, faktor internal petahana seperti rekam jejak, besarnya kekuatan politik yang dimiliki, dan pemilihan pasangan wakil bupati yang tepat; *Ketiga*, faktor eksternal petahana yakni lawan yang tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat, minimnya dukungan partai dan tidak solidnya antara pasangan dan tim pemenangan yang berdampak pada minimnya perolehan suara pada saat pemungutan suara. Temuan dalam penelitian ini adalah kemenangan tinggi yang diperoleh petahana berasal dari besarnya kekuatan politik yang dimiliki petahana, sehingga kekuatan politik penantang terbatas. Petahana mampu memobilisasi kekuatan politik karena adanya dukungan modalitas yang dimiliki.

Kata Kunci : **Kekuatan Politik, Petahana, Pemilihan Bupati**

ABSTRACT

THE POLITICAL POWER AND THE VICTORY OF INCUMBENT IN THE 2020 WAY KANAN ELCTION FOR REGENT

By

TRI SEKTIONO

Raden Adipati Surya is the incumbent in the 2020 Way Kanan election for regent and deputy regent with a winning percentage of 74.9 percent and the highest winning percentage in the 2020 simultaneous local elections in Lampung Province. This study aims to determine: (1) The influence of political power on incumbents win; (2) What factors influence the incumbent's victory in the Way Kanan Pilbub in 2020. This research method is descriptive qualitative with data sourced from interviews with several informants and documentation. The results of this study indicate the role of the political forces studied, namely the mass media and social media, bureaucracy, community organizations, and economic capital. The power relations that occur between political forces and incumbents are clientelistic, patronage, and brokerism in nature. There are three factors that influence the incumbent's victory, namely: First, the Covid-19 pandemic factor through the politicization of Cash Social Assistance (BST); Second, the incumbent's internal factors such as track record, the amount of political power he has, and the selection of the right vice-regent pair; Third, the incumbent's external factors, namely opponents who do not have close ties with the community, lack of party support and not being solid between the pair and the winning team which has an impact on the minimum vote acquisition at the time of voting. The findings in this study are that the high wins obtained by incumbents come from the amount of political power possessed by incumbents, so that the political power of challengers is limited. Incumbents are able to mobilize political power because of the modality support they have.

Keyword : Political Power, Incumbent, Regent Election

**KEKUATAN POLITIK DAN KEMENANGAN PETAHANA
DALAM PEMILIHAN BUPATI WAY KANAN TAHUN 2020**

**Oleh
TRI SEKTIONO**

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Ilmu Pemerintahan**

Pada

**Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **KEKUATAN POLITIK DAN
KEMENANGAN PETAHANA DALAM
PEMILIHAN BUPATI WAY KANAN
TAHUN 2020**

Nama Mahasiswa : **Tri Sektiono**

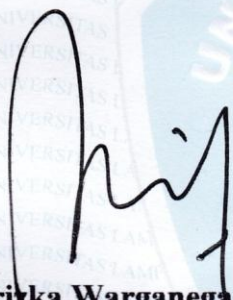
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926021002

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

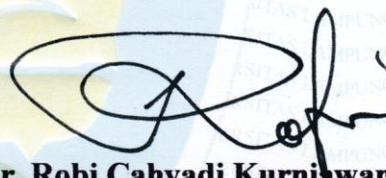
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

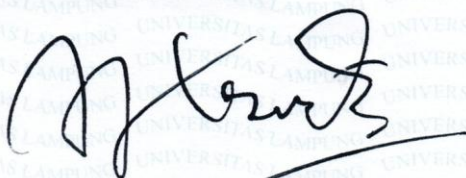


Ariyka Warganegara, Ph.D.
NIP. 19810620 200604 1 003



Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.
NIP. 19780430 200501 1 002

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 19601010 198603 1 006

MENGESAHKAN

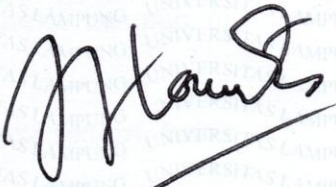
1. Tim Penguji

Ketua : **Arizka Warganegara, Ph.D.**



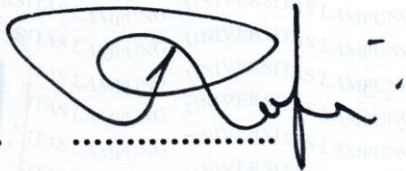
.....

Penguji Utama : **Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**



.....

Sekretaris : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, M.A.**



.....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001



3. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001



Tanggal Lulus Ujian Tesis : 14 April 2023

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini tidak pernah terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Akademik (Magister) baik di Indonesia maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di Universitas lampung.

Bandar Lampung, 14 April 2023
Penulis,



TRI SEKTIONO
NPM. 1926021002

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki nama lengkap **TRI SEKTIONO**. Lahir di Way Kanan pada tanggal 08 Oktober 1996 sebagai putra ketiga dari pasangan Bapak Boyadi dan Ibu Ismiati. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, memiliki dua kakak laki-laki yang bernama Arik Eriyantono & Derit Vikiyono. Serta memiliki seorang istri yang bernama Ersi Ferdila yang dikaruniai seorang putri bernama Shaheen Athiyah Maezurra.

Penulis mengawali pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda di Kampung Gunung Sari lulus tahun 2008, kemudian melanjutkan Pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah Nurul Hidayah Kecamatan Rebang Tangkas lulus tahun 2011. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Rebang Tangkas Kabupaten Way Kanan lulus tahun 2014. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan studi di Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang lulus pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan Pascasarjana di Jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

“Jangan meninggalkan selain kebaikan dan bermanfaat disegala tempat”

(Tri Sektiono)

“Tuhan tidak pernah meminta kepada manusia untuk membantu Nya memerangi kebathilan. Tuhan mengajarkan kepada kita berdoa memohon bantuan Nya dalam memerangi kebathila”

(Haji Agus Salim)

SANWACANA

Assalamualaikum wr wb,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT shalawat serta salam tercurahkan kepada nabi MUHAMMAD SAW yang telah melimpahkan nikmat, anugrah serta kesehatan kepada penulis. Dengan rahmat dan pertolongan ALLAH SWT serta bantuan dari berbagai pihak jualah penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Tesis yang berjudul “*Kekuatan Politik dan Kemenangan Petahana dalam Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020*” tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, namun dapat terselesaikan dengan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa hormat setinggi-tingginya dan terimakasih tak terhingga kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si. Ph. D. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, sekaligus sebagai Pembahasa dan

Penguji yang telah memberikan kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;

5. Bapak Arizka Warganegara, Ph.D selaku pembimbing yang senantiasa selalu membimbing peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
6. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP. M.A. selaku pembimbing yang senantiasa membimbing Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Dosen dan Staff Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Unila, terimakasih atas ilmu dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama di Jurusan Ilmu Pemerintahan;
8. Seluruh informan;
9. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 2019;
10. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas amal baik kita semua dan semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2023
Penulis,

TRI SEKTIONO

NPM. 1926021002

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
2.2 Rumusan Masalah	11
2.3 Tujuan Penelitian	11
2.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Konsep Kekuatan Politik	13
2.2 Media Massa dan Media Sosial Sebagai Kekuatan Politik.....	15
2.3 Birokrasi Sebagai Kekuatan Politik	17
2.4 Ormas Sebagai Kekuatan Politik	20
2.5 Kelompok Ekonomi Sebagai Kekuatan Politik	22
2.6 Relasi Kuasa Petahana dan Kekuatan Politik	25
2.6.1 Sifat Hubungannya.....	27
2.6.2 Patronase	29
2.6.3 Klientalisme	31
2.6.4 Broker	33
2.7 Kerangka Pikir	39
III. METODE PENELITIAN	40
3.1 Tipe Penelitian.....	40
3.2 Fokus Penelitian	41
3.3 Informan	41
3.4 Jenis dan Sumber Data	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data	43
3.6 Teknik Analisis Data	44

3.7 Teknik Keabsahan Data.....	46
IV. GAMBARAN UMUM	47
4.1 Sejarah Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan.....	47
4.2 Gambaran Umum Pilkada Way Kanan Tahun 2020	49
4.3 Profil Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020.....	54
4.2.1 Profil Bupati Way Kanan Tahun 2020.....	54
4.2.2 Profil Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020.....	55
4.2.3 Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020	55
4.4 Kekuatan Politik dalam Pilbub Way Kanan Tahun 2020.....	56
4.4.1 Media Massa di Kabupaten Way Kanan.....	56
4.4.2 Birokrasi Kabupaten Way Kanan	57
4.4.3 Organisasi Masyarakat di Kabupaten Way Kanan	59
4.4.4 Kelompok Ekonomi Kabupaten Way Kanan.....	60
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	61
5.1 Peran Kekuatan Politik Terhadap Kemenangan Petahana	61
5.1.1 Peran Media Massa dan Media Sosial Terhadap Kemenangan Petahana	62
5.1.2 Peran Birokrasi Terhadap Kemenangan Petahana	70
5.1.3 Peran Organisasi Masyarakat Terhadap Kemenangan Petahana...	74
5.1.4 Peran Kekuatan Modalitas Terhadap Kemenangan Petahana	79
5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemenangan Petahana	93
5.2.1 Faktor Internal	93
5.2.2 Faktor Eksternal.....	101
5.3 Telaah Akhir.....	104
VI. SIMPULAN DAN SARAN	109
6.1 Simpulan.....	109
6.2 Saran.....	111

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Hasil Perolehan Suara Petahana Pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung	3
2. Daftar Jumlah Kursi di DPRD Partai Pengusung Calon di pemilihan bupati dan wakil bupati Way Kanan	4
3. Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020	5
4. Informan Penelitian	38
5. Daftar Nama Pasangan Calon Pada Pilkada Kabupaten Way Kanan Tahun 2010.....	45
6. Daftar Nama Pasangan Calon Pada Pilkada Kabupaten Way Kanan Tahun 2015.....	46
7. Daftar Stasiun Radio di Way Kanan	54
8. Rincian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Way Kanan	55
9. Jumlah PNS Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020	55
10. Jumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) Menurut Kecamatan di Kabupaten Way Kanan, 2016-2020	57
11. Industri di Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.....	57
12. Laporan Sumbangan Dana Kampanye Pilbub Way Kanan Tahun 2020	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	36
2. Poster bakal calon bupati dan wakil bupati Berhias.....	42
3. Poster bakal calon bupati dan wakil bupati pasangan Juprius-Juanda.....	43
4. Poster bakal calon bupati dan wakil bupati Berani Sekali Lagi.....	43
5. Gambar Pasangan Adipati Surya dan Ali Rahman disertai logo partai pengusung	49
6. Gambar Pasangan Calon Bupati Arjuna	50
7. Poster Berani Pasti Aman.....	62
8. Visi dan misi calon bupati Berani Pasti Aman.....	64
9. Rekapitulasi Temuan dan Laporan Berdasarkan Jenis Pelanggaran.....	67
10. Bupati Way Kanan bagikan Bansos di Kamp. Mulya Jaya	80
11. Jumlah Pertemuan Kampanye Tatap Muka Terbatas.....	85
12.	

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan sarana bagi rakyat untuk melakukan aktivitas seleksi kepemimpinan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Agenda pilkada dimaksudkan untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil walikota, dan bupati dan wakil bupati yang pesertanya adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai politik atau non partai politik (*independen*) yang memenuhi syarat. Dalam setiap ajang pilkada keberadaan petahana sebagai kontestan sangat diperhitungkan. Petahana yang berpartisipasi kembali didasarkan pada kalkulasi kemenangan yang dapat diukur melalui kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahannya, pencapaian program pembangunan, politisasi birokrasi dan memiliki finansial yang tinggi atas konsekuensi demokrasi langsung (*direct democracy*), diperparah dengan pragmatisme partai untuk tidak mengambil resiko mendukung kandidat yang berpotensi kalah menjadi faktor yang tidak dapat dikecualikan (Fadli, 2018).

Munculnya fenomena calon petahana dalam kontestasi pilkada bukanlah sesuatu yang baru, dari 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, terdapat 290 calon petahana yang bertarung di 236 daerah atau sekitar 87,40% (CNN, 2020). Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pilkada serentak sebelum-sebelumnya, karena dilaksanakan ditengah mewabahnya virus *covid-19*. Keadaan tersebut disatu sisi kandidat yang belum dikenal masyarakat menjadi terkendala dengan keterbatasan pergerakan namun disisi lain kandidat yang berasal dari petahana memiliki

keuntungan tersendiri karena sudah lebih dikenal oleh masyarakat. Catherine Needam dalam (Tiran, 2017) menyebutkan keuntungan lain petahana adalah bisa melakukan kampanye permanen. Ditengah keterbatasan kampanye pada pilkada 2020, hanya petahana yang bisa bebas bertemu warga seperti memberikan bantuan sosial (Bansos) dan program lainnya. Lebih lanjut, menurut Kuskridho dalam (Gustamar & Pasha, 2021) mengatakan gelanggang pilkada bisa mengalami pergeseran ketika sumber APBD bisa menjadi titik rawan ketika anggaran kesehatan dimanfaatkan oleh petahana untuk tujuan pemenangan politik dengan beragam kemungkinan teknik dan manipulasinya.

Keikutsertaan petahana dalam pilkada memang memiliki kesempatan yang besar untuk terpilih kembali. Menurut Cox dan Katz dalam (Sukmajati, 2017) terdapat tiga faktor yang membuat petahana terpilih kembali, yaitu pengaruh langsung dari bentuk layanan yang diberikan selama menjabat, pengaruh kualitas kandidat semisal ketrampilan menghadapi pemilih dalam kampanye dan pengaruh dalam memberikan keraguan kepada penantang. Pada dasarnya kampanye adalah mekanisme kunci dimana keuntungan petahana beroperasi. Kemampuan petahana dalam menyampaikan keberhasilan kinerjanya pada periode sebelumnya akan memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh kemenangan.

Namun dalam Pilkada 2020 faktanya tidak semua petahana berhasil menang dalam keadaan pandemi *covid-19*. Terkhusus di Provinsi Lampung, dari total delapan daerah yang mengikuti Pilkada Desember 2020, ada delapan petahana yang mengikuti kembali Pilkada (Lampung.co, n.d.). Pilkada di Kota Metro menjadi satu-satunya yang tidak memiliki petahana, ke empat pasang calon yang bertarung merupakan wajah baru. Kiprah petahana dalam pilkada Tahun 2020 di Provinsi Lampung dapat ditunjukkan mealui tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Perolehan Suara Petahana Pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung.

PETAHANA	KABUPATEN / KOTA	PEROLEHAN SUARA	KET.
Nanang Erwanto	Lampung Selatan	36,2%	Menang
Loekman Djoyosoemarto	Lampung Tengah	20,1%	Kalah
Zaiful Bokhari	Lampung Timur	38,1%	Kalah
Raden Adipati Surya	Way Kanan	74,9%	Menang
Dendi Ramadhona K.	Pesawaran	56,1%	Menang
Agus Istiqlal	Pesisir Barat	46,4%	Menang
Erlina	Pesisir Barat	39,7%	Kalah
Muhammad Yusuf Kohar	Kota Bandar Lampung	21,4%	Kalah

Sumber: (Diolah penulis, 2020)

Berdasarkan tabel 1. Hasil Perolehan Suara Petahana Pada Pilkada Serentak tahun 2020 di Provinsi Lampung tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwasanya petahana tidak selalu dapat dengan mudah memenangkan pilkada. Dari 8 calon petahana yang mengikuti kontestasi pilkada 4 petahana memperoleh kemenangan dan 4 lainnya harus menerima kekalahan.

Mengacu pada tabel 1. Raden Adipati Surya menjadi calon petahana yang memperoleh persentase kemenangan tertinggi, yakni sebesar 74,9%. Perolehan suara tersebut selisih signifikan jika dibandingkan dengan perolehan suara petahana yang lain. Raden Adipati Surya merupakan petahana Bupati Kabupaten Way Kanan periode 2016-2021. Sehingga menarik untuk dikaji lebih jauh terkait keberhasilan petahana dalam memenangkan Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020.

Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020 diikuti oleh dua pasang calon yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Way Kanan pada 23 September 2020. Refki Darmawan selaku Ketua KPU Way Kanan menginformasikan kepada media senator.id bahwa:

“Pasangan Raden Adipati Surya – Drs. Ali Rahman, M.T. yang diusung 7 partai yaitu Demokrat, PKB, Nasdem, PAN, Golkar, Hanura dan PKS dengan 32 kursi DPRD dinyatakan memenuhi

syarat. Pasangan H. Juprius – Dr. Rina Marlina yang diusung Partai Gerindra dan PDI-Perjuangan dengan 8 kursi dinyatakan memenuhi syarat (Senator, 2020).

Pasangan Juprius dan Rina Marlina mendapat nomor urut 1, dan pasangan Raden Adipati Surya dan Ali Rahman yang mendapat nomor urut 2. Tidak ada calon independen dalam Pilkada Way Kanan, kedua pasangan calon sama-sama diusung oleh partai politik. Berbicara mengenai pilkada tentunya tidak terlepas dari peran partai politik. Berikut partai pengusung dan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Way Kanan:

Tabel 2. Daftar Jumlah Kursi di DPRD Partai Pengusung Calon di pemilihan bupati dan wakil bupati Way Kanan.

No. Urut	NAMA PASANGAN	PARTAI PENGUSUNG	KURSI DPRD
1	Juprius dan Rina Marlina	PDI P	4
		GERINDRA	4
2	Raden Adipati Surya dan Ali Rahman	DEMOKRAT	11
		NASDEM	5
		PKB	5
		PAN	4
		GOLKAR	3
		HANURA	2
		PKS	2

Sumber: (Diskominfo.waykanankab.go.id, 2019)

Berdasarkan tabel 2. Daftar Jumlah Kursi di DPRD Partai Pengusung Calon di pemilihan bupati dan wakil bupati Way Kanan, terlihat bahwa calon petahana sangat dominan dalam memperoleh dukungan partai politik. Menurut (Hertanto & Sulaiman, 2013) koalisi partai sering lebih tertarik mendukung calon petahana (*incumbent*). Langkah yang ditempuh oleh partai politik ini karena partai lebih mementingkan kemenangan persatuan gabungan partai dengan mengesampingkan faktor ideologi dan basis masa atau konstituen partai itu sendiri. Namun pilkada bukanlah pertarungan antar partai politik, dalam pilkada yang dijual adalah profil atau citra kandidat. Menurut (Razaqtiar, 2016) orientasi masyarakat sekarang adalah memilih figure atau pasangan calon dalam pilkada bukan memilih partai politik semata. Lebih lanjut menurut (Aspinall & Berenschot, 2019) partai

politik sering kali tereduksi sekedar menjadi penjaga tol, menawarkan pencalonan pada bakal calon namun hamper tidak memberikan bantuan apa pun dalam kampanye calon tersebut atau menertibkan atau mengarahkan perilaku para calon itu ketika mereka sudah terpilih. Sehingga partai politik tidak menjadi kekuatan politik utama dalam menentukan keberhasilan kandidat. Oleh sebab itu, biasanya para kandidat akan membangun kekuatan politiknya melalui jejaring sosial lainnya.

Berdasarkan hasil hitung suara pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbub) Way Kanan tahun 2020 Pasangan Raden Adipati Surya memperoleh suara tertinggi. Berikut tabel hasil suara pilbub Way Kanan:

Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020

No.	WILAYAH	Juprius dan Rina Marlina	Raden Adipati Surya dan Ali Rahman
1	Blambangan Umpu	5.879	10.518
2	Kasui	3.459	12.405
3	Banjit	4.248	20.930
4	Baradatu	5.144	16.230
5	Bahuga	1.384	5.430
6	Pakuan Ratu	5.969	15.761
7	Negeri Agung	5.445	14.301
8	Way Tuba	4.069	8.038
9	Rebag Tangkas	3.226	8.076
10	Gunung Labuhan	3.356	11.652
11	Negara Batin	4.900	12.424
12	Negeri Besar	2.782	6.690
13	Buay Bahuga	2.690	8.838
14	Bumi Agung	3.745	10.535
15	Umpu Semenguk	2.988	14.935
	Jumlah	59.284	176.826
	Persentase	25,1%	74,9%

Sumber: (pilkada2020.kpu.go.id, 2020)

Berdasarkan tabel 3. Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020 pada 9 Desember 2020 menunjukkan bahwa petahana Raden Adipati Surya dan Ali Rahman mampu unggul diseluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Way Kanan. Kemenangan tersebut tentunya tidak lepas dari strategi politik yang dijalankan. Strategi politik

diartikan sebagai seperangkat metode agar dapat memenangkan pertarungan antara berbagai kekuatan politik yang menghendaki kekuasaan. Selain strategi politik yang dijalankan, kemenangan Raden Adipati Surya dan Ali Rahman yang begitu besar, mengindikasikan besarnya kekuatan politik yang dimiliki. Seperti dukungan partai politik yang besar, jaringan relawan yang luas dan posisi petahana yang memiliki pengaruh terhadap birokrasi tentunya turut mempengaruhi hasil pilkada.

Kemenangan petahana dalam pilkada dapat dilihat sebagai kuatnya kepercayaan publik terhadap kinerja petahana yang hanya dapat diwujudkan melalui implementasi desentralisasi agar tidak menciderai prinsip-prinsip demokrasi (Tiran, 2017). Sedangkan menurut (Choirina, 2017) menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap keterpilihan kepala daerah petahana. Meskipun demikian, tidak semua petahana dengan kinerja yang baik dapat memenangkan kembali saat maju dalam pilkada.

Tujuan memperoleh dan mempertahankan kekuasaan membuat setiap kandidat berupaya memanfaatkan segala bentuk sumberdaya yang dimilikinya. Baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya materil. Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum/pilkada. Maka menarik untuk melihat keberhasilan petahana melalui kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki oleh calon petahana dalam memenangkan pilkada.

Menurut (Asrinaldi, 2014) setidaknya ada tiga alasan urgensi memahami kekuatan politik. *Pertama*, terkait dengan perubahan politik yang signifikan pada Orde Reformasi. *Kedua*, terkait dengan dinamika dari kekuatan-

kekuatan politik menghadapi kerasnya kompetisi dalam memengaruhi kebijakan publik. *Ketiga*, berkaitan dengan konsolidasi demokrasi sebagai fase lanjutan dari proses transisi demokrasi. Perwujudan konsolidasi demokrasi didahului dengan proses tawar-menawar diantara kekuatan-kekuatan politik yang ada hingga terwujud kesepakatan demi kepentingan bersama. Proses tawar-menawar menunjukkan adanya dinamika politik. Adanya tawar-menawar tersebut menunjukkan bahwa kekuatan politik telah menjalankan peran dan fungsi yang semestinya.

Penelitian ini memfokuskan pada pasangan calon petahana Raden Adipati Surya dan Ali Rahman dengan alasan pasangan tersebut merupakan petahana yang berhasil terpilih kembali pada pilbub Way Kanan Tahun 2020. Raden Adipati Surya dan Ali Rahman memenang di 15 wilayah kecamatan di Kabupaten Way Kanan. Pasangan ini juga memperoleh persentase kemenangan tertinggi dibandingkan pemenang di pilkada kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung yang mengikuti pilkada serentak tahun 2020 yakni sebesar 74,9%. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari besarnya kekuatan politik yang dimiliki. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis kekuatan-kekuatan politik pada pemenangan pasangan calon petahana.

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu dengan bahasan yang sama sebagai acuan. Penelitian yang dilakukan Galih Satria Utomo (2012) dengan judul Relasi Kekuatan-Kekuatan Politik Lokal dalam Pemenangan Pilkada di Mojokerto. Menggunakan teori relasi kuasa, hasil penelitian ini menunjukkan relasi kuasa antara kekuatan kandidat tidak luput dari peran partai politik yang mendukungnya, hal ini yang mempengaruhi kemenangan dalam pilkada.

Penelitian Roy Natsir (2014) yang berjudul Kekuatan Politik Danny Pomanto dan Syamsul Rizal dalam Pemilihan Walikota Makasar Tahun 2013. Menggunakan teori kekuatan politik, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa ada beberapa kekuatan politik yang mendukung proses pemenangan yaitu actor politik, partai politik, birokrasi dan media massa.

Penelitian Muhammad Ayub Liwang (2016) dengan judul Kekuatan dan Strategi Politik dalam Pilkada (Analisis Terhadap Kemenangan Adnan Purihcta dalam Pilkada Kabupaten Gowa). Menggunakan teori kekuatan politik dan komunikasi politik, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kekuatan politik Adnan sangat berpengaruh dalam pilkada Kabupaten Gowa bagi mana pemanfaatan birokrasi, partai politik, Klan politik dan media yang dijadikan sebuah alat untuk menjalani proses pilkada.

Penelitian yang dilakukan oleh Rex Tiran (2017) yang berjudul Kemenangan Petahana dan Demokrasi Lokal Dalam Pilkada Kabupaten Kupang Tahun 2013. Menggunakan teori demokrasi lokal, hasil penelitian ini menunjukkan kemenangan petahana sebagai kuatnya kepercayaan publik terhadap kinerja petahana yang hanya dapat diwujudkan melalui implementasi desentralisasi.

Penelitian Fauzia Fitrianingrum (2017) berjudul Analisa Kemenangan Petahana dengan Studi Kasus Badingah, Bupati Gunung Kidul Dua Periode. Menggunakan teori potensi petahana yaitu keuntungan, keterbatasan dan kutukan petahana. Hasil penelitian ini, Badingah mampu mengelola potensi petahana dengan baik, sehingga terpilih kembali menjadi Bupati di Pilkada Gunung Kidul 2015.

Penelitian Khoiron dkk. (2018) berjudul Kemenangan Petahana (*Incumbent*) pada Pilkada 2015 Di Kota Surabaya dan Kabupaten Malang: Strategi Politik dan Marketing Politik. Menggunakan teori marketing politik, hasilnya keterpilihan calon petahana memiliki modal social dan politik yang positif dimata pemilih dan juga para calon menyampaikan keberhasilan didalam membangun infrastruktur didaerah.

Penelitian Muh. Irfan (2018) dengan judul *Kekuatan Politik Birokrasi (Studi terhadap Kemenangan Petahana Hatta Rahman pada Pilkada Kab. Maros Tahun 2015)*. Menggunakan teori strategi politik, teori komunikasi politik dan teori birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu strategi politik yang dilakukan petahana untuk memenangkan kontestasi pemilu adalah dengan memanfaatkan kekuatan birokrasi melalui: jaringan yang luas dan sistem organisasi yang massif, akses terhadap penguasaan sumber daya, instrument komunikasi pemerintah, pelaksana kebijakan publik, dan representasi kepemimpinan politik.

Penelitian Agus (2018) berjudul *Incumbent Dimata Pemilih*, menggunakan teori persepsi dan teori sikap dari John M. Echols dan Hasan Sadily. Hasilnya ada dua aspek yang dapat menjadi penentu kemenangan petahan yakni faktor subjektifitas pemilih (mencakup persepsi, sikap dan perilaku psioitif pemilih terhadap petahana) dan objektivitas pemilih (yakni kebijakan publik, birokrasi, partai politik dan ormas).

Penelitian Andi Muh. Dzul Fadli dkk. (2018) berjudul *Kemenangan Petahana dalam Kontestasi Pilkada Serentak 2018: Ditinjau Dari Perspektif Powercube*. Menggunakan teori kubus kekuasaan hasil kajian menunjukkan ada 3 bentuk kekuasaan sebagai faktor kemenangan, yakni kekuasaan yang terlihat, kekuasaan yang tersembunyi dan kekuasaan yang tidak terlihat.

Penelitian Ikmal (2019) dengan judul *Analisis Perbandingan Kekuatan Politik antara Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar dan Andi Mudzakkar di Luwu pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan 2018*. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kekuatan politik dan teori patrimonialisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tokoh tersebut memiliki pengalaman dan kekuatan politik yang berbeda.

Penelitian Hendrik Saku Bouk (2020) yang mengambil judul *Metafisika Politik: Menimbang Kekuatan Aristokrasi dalam Pilkada Belu dan Malaka Tahun 2020*. Menggunakan teori tiga relasi kekuatan politik, yaitu: Fisika Politik, Metafisika Politik, dan Patafisika Politik. Dalam pilkada Belu dan Malaka, para calon kandidat berusaha meraih kemenangan dengan cara membangun kekuatan politik melalui koalisi partai, dukungan masa dalam kampanye, kekuatan fisika politik dengan menggerakkan seluruh kekuatan mesin politik, kekuatan patafisika melalui jaringan virtual dan tetap mempertimbangkan kekuatan metafisika politik berbasis aristokrasi.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Tiran, Fitrianingrum (2017) Khoiron dkk., Agus, Irfan, Fadli dkk. (2018) yaitu pada objek penelitian yang sama-sama meneliti tentang kemenangan petahana dalam pilkada. Penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian Galih (2012), Natsir (2014), Liwang (2016), Ikmal (2019) dan Bouk (2020) yaitu dalam hal fokus penelitian pada kekuatan-kekuatan politik dalam pilkada.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Tiran, Fitrianingrum (2017) Khoiron dkk., Agus, Irfan, Fadli dkk (2018) yaitu pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki petahana dalam memenangkan pilkada. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Galih (2012), Natsir (2014), Liwang (2016) dan Bouk (2020) yaitu pada teori yang digunakan. Pada penelitian Galih (2012) menggunakan teori relasi kuasa, Natsir (2014) dan Liwang (2016) menggunakan teori kekuatan politik dari Gabriel A. Almond, sementara penelitian Ikmal (2019) menggunakan teori kekuatan politik dari Farhan Bulkin, dan penelitian Bouk (2020) menggunakan teori relasi kekuatan politik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuatan-kekuatan politik dari Asrinaldi (2014). Penelitian ini mengangkat judul

“Kekuatan Politik pada Kemenangan Petahana dalam Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020”.

2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kekuatan politik terhadap kemenangan petahana Raden Adipati Surya dan Ali Rahman dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan petahana Raden Adipati Surya dan Ali Rahman dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020?

2.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh kekuatan politik terhadap kemenangan petahana Raden Adipati Surya dan Ali Rahman dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemenangan petahana Raden Adipati Surya dan Ali Rahman dalam memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Tahun 2020.

2.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1.1.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap ilmu politik khususnya tentang politik lokal dalam hal teori kekuatan-kekuatan politik dalam pilkada serta pengaruhnya terhadap kemenangan calon petahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan temuan dalam mengembangkan kajian pencitraan politik, menambah pengetahuan, serta bermanfaat untuk memperkaya referensi kajian pustaka maupun penelitian sejenisnya.

1.1.2. Mafaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi yang terlibat langsung dalam masalah yang berkaitan dengan pemenangan petahana dalam pilkada. Serta memberi masukan bagi calon petahana serta organisasi/lembaga yang berhubungan dengan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini diharapkan menjadi satu temuan yang baru yang dapat dijadikan bahan kajian oleh para akademisi/peneliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kekuatan Politik

Mengamati suatu tindakan yang bersifat politis, maka harus mencakup proses dimana sekelompok manusia menggunakan kekuatan atas orang lain untuk mencapai tujuannya. Menurut Hays dalam (Muhdar, 2021) mengemukakan kekuatan politik merupakan gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan dalam mencapai atau mempertahankan tujuannya, gerakan tersebut dapat berupa gerakan konservatif maupun gerakan progresif dengan menerapkan nilai-nilai liberalisme. Sementara Bakhtiar Effendi dalam (Beruatyaan et al., 2021) mengemukakan bahwa kekuatan-kekuatan politik adalah segala sesuatu yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif didalam dunia politik.

Menurut Miriam Budiardjo yang diartikan dengan kekuatan politik adalah bisa masuk dalam pengertian individual maupun kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual, kekuatan-kekuatan politik tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Orang-orang ini terdiri dari pribadi-pribadi yang hendak mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Dan secara kelembagaan disini kekuatan politik sebagai lembaga atau organisasi ataupun bentuk lain yang melembagakan dan bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam sistem politik.

Di Indonesia, khususnya pada masa reformasi, peran kekuatan-kekuatan politik telah tampil dan berfungsi berdasarkan karakter masing-masing.

Secara kelembagaan, perkembangan karakter kekuatan-kekuatan politik dipengaruhi oleh interaksi di antara mereka, dan dalam banyak aspek dipengaruhi juga oleh persaingan yang terjadi. Sehingga menurut Farchan Bukin dalam (Asrinaldi, 2014) perlu meletakkan kembali tata susunan politik dalam konteks model teori sistem dan keberadaan kekuatan politik. Caranya adalah dengan memahami bentuk, peranan, dan fungsi kekuatan politik kontemporer didalam sistem politik.

Kekuatan politik kontemporer menjelma menjadi beberapa bentuk yang lazim dikenal dalam kehidupan masyarakat modern, yakni partai politik, kelompok kepentingan, birokrasi, militer, pemuda dan mahasiswa, organisasi buruh, dan sebagainya. Kekuatan politik tersebut dapat menampilkan perannya sendiri tanpa harus melibatkan kekuatan politik lain. Namun, dari segi lain kekuatan politik juga dapat menjalin kerjasama dengan kekuatan politik lain untuk mewujudkan kepentingannya dan kepentingan masyarakat. Interaksi dalam bentuk kerjasama ini dapat terwujud karena adanya agenda publik yang harus mereka perjuangkan (Asrinaldi, 2014). Menurut Menurut (Zeliana et al., 2021) keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat dilihat dari kemampuan aktor tersebut dalam melakukan fungsinya.

Kehadiran kekuatan politik dapat membantu mewujudkan pemimpin alternative dalam melaksanakan aspirasi masyarakat. Kekuatan politik juga dapat melakukan pengawasan terhadap proses politik dan pemerintahan sesuai dengan konstitusi yang telah disepakati bersama. Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang telah disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah dengan ikut pemilihan umum. Bentuk perwujudan kekuatan-kekuatan politik dalam pemilihan kepala daerah antara lain adalah partai politik, media massa, birokrasi, dan kelompok kepentingan atau

organisasi kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, kekuatan-kekuatan politik lebih difokuskan kepada *civil society* dan tidak difokuskan pada partai politik yang menurut Aspinall dan Berenschot hanya sebagai penjual tiket pencalonan saja.

2.2 Media Massa dan Media Sosial Sebagai Kekuatan Politik

Di era saat ini informasi telah menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dicari oleh publik dan media massa merupakan wadah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. perkembangan teknologi juga mempengaruhi berkembangnya media massa menjadi berbagai macam bentuk tidak hanya berupa media cetak seperti koran, majalah, atau media elektronik seperti berita di radio dan televisi, namun dengan berkembangnya internet berkembang portal-portal berita online. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses kebutuhan berita yang mereka inginkan cukup dengan menggunakan *smartphone* dan *gadget* mereka.

Media massa secara pasti mempengaruhi pemikiran dan tindakan khalayak. Budaya, social, politik dipengaruhi oleh media massa. Media massa dapat dikatakan sebagai kebudayaan yang bercerita. Media membentuk opini publik untuk membawanya pada perubahan yang signifikan. Pesan media tidak jadi begitu saja, tetapi dibuat dan diciptakan oleh media massa dengan tujuan tertentu (Mustapa et al., 2014). Dengan demikian tersirat bahwa media massa itu perkasa dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak. Dalam penerapannya, media massa membuat agenda tertentu mengenai apa yang harus dipikirkan khalayak dengan memilih dan mengemas informasi yang dikehendaki (Musfialdy, 2015). Sehingga media massa memiliki posisi penting dan strategis dalam kehidupan politik.

Media massa merupakan sarana komunikasi politik yang memiliki jangkauan luas. Media massa digunakan untuk meraih sebanyak mungkin pemilih yang menjadi target dengan waktu yang cepat dan biaya yang

mudah. Tidak mungkin bagi tim sukses dalam kampanye baik pemilu legislatif, pemilihan presiden, gubernur atau bupati/walikota mendatangi semua target pemilih mereka secara langsung. Media massa baik cetak, siaran maupun media massa internet mempunyai kekuatan yang sangat besar dalam kaitannya dengan usaha mencapai tujuan komunikasi politik (Yasir, 2013). Para kandidat dan tim sukses partai politik bisa memaksimalkan komunikasi mereka sesuai kekuatan yang dimiliki masing-masing media massa. Kekuatan media massa tidak hanya mampu merepresentasikan kepentingan elit politik dan khalayaknya, namun yang dominan adalah para pemilih dan pengusaha yang memiliki relasi dalam kepentingan politik tertentu.

Media massa atau pers juga muncul sebagai kekuatan politik pada era reformasi. Ketersediaan informasi politik yang dibutuhkan masyarakat dapat dijadikan modal dasar untuk melakukan tawar-menawar dengan pemerintah. Didalam masyarakat yang demokratis, informasi menjadi pengetahuan politik masyarakat untuk dijadikan dasar keterlibatan mereka didalam proses demokrasi. Di negara yang demokrasinya telah maju seperti Amerika Serikat, peran media sebagai penyedia informasi politik mendorong percepatan proses demokrasi (Asrinaldi, 2014).

Media massa juga berperan sebagai aktor politik dalam proses politik sebagaimana aktor-aktor politik lainnya. Media massa memiliki peran penting dalam sistem politik yang demokratis, salah satu fungsi media massa sebagai saluran komunikasi politik yang awalnya berasal dari luar media itu sendiri dan sekaligus juga sebagai pengirim dari pesan-pesan politik yang dikonstruksi oleh jurnalis (Junaedi, 2013:37). Menurut (Arswendi, 2017) media massa memiliki peran utama dalam pilkada dapat dilihat pada saat debat calon, proses kampanye dan pada saat pemantauan dalam pencoblosan.

Namun, lanskap demokrasi sedang mengalami perubahan yang sebelumnya proses penyampaian informasi dilakukan secara vertical melalui media massa, kini proses tersebut menjadi lebih horizontal dengan kehadiran media baru. Dalam pemikiran Liverouw dan Livingstone, ada tiga hal yang menjadi ke khasan media sosial sebagai media baru yakni perangkat, praktik komunikasi dan organisasi sosial. Dimulai dari perangkat lalu diikuti oleh ruang baru (*new space*) yang membuat interaksi dan komunikasi menjadi relatif lebih mudah. Media baru tersebut bernama media sosial, yakni sebuah platform digital yang memungkinkan para penggunanya untuk saling berkomunikasi dengan membagikan konten berupa tulisan, foto maupun video.

Dalam konteks pilkada, media sosial menjadi ruang baru dalam mengkampanyekan kandidat dan bahkan menjadi andalan para tim pemenangan dan kandidat. Bahkan, jika ada kandidat yang cenderung mengabaikan media sosial dapat dipastikan akan mengalami kekalahan. Andrew Chadwick dalam (Rizky Gerry Supit & Eka Enats Wuryana, 2021) menjelaskan setidaknya ada beberapa poin yang menjadikan media sosial yang mampu mempengaruhi komunikasi politik. *Pertama*, media sosial akan menaikkan level atau derajat persaingan kandidat. *Kedua*, media sosial mengembangkan pola komunikasi interaktif antara kandidat dengan masyarakat atau pemilih. *Ketiga*, media sosial sebagai *tool* atau alat adaptasi kelembagaan. Adaptasi kelembagaan berarti ada pergeseran bentuk aktivitas kandidat dari *offline* ke *online*.

2.3 Birokrasi Sebagai Kekuatan Politik

Di Indonesia jika ada bahasan tentang birokrasi maka persepsi orang tidak lain adalah birokrasi pemerintah (Thoha, 2014). Secara sederhana birokrasi adalah unsur pelaksana administrasi publik agar tujuan pelayanan kepada masyarakat tercapai secara efektif, efisien dan rasional. Ciri pokok pejabat birokrasi adalah orang yang diangkat, bukan dipilih. Birokrasi sebagai institusi dalam pemerintahan tidak lepas dari aktivitas kekuasaan dalam

melaksanakan fungsi Negara. Malah dalam konteks yang lebih luas, Rueschemeyer & Evans menegaskan bahwa sebagai kekuatan Negara, birokrasi melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Sebagai kekuatan dalam sistem politik, menurut (Asrinaldi, 2014) birokrasi memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Sebagai sebuah istilah (*term*) birokrasi merupakan konsep politik yang mengandung pengertian kekuasaan dalam proses politik dan pemerintahan yang bekerja dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
2. Sebagai instrument penyelenggara pemerintahan, tugas-tugas birokrasi berkaitan erat dengan bagaimana negara diorganisasikan.
3. Berkenaan dengan kekuasaan yang dilegitimasi sehingga birokrasi memiliki otoritas terhadap rakyat, maka birokrasi melakukan apa yang diperintahkan oleh negara.
4. Ada kedekatan hubungan antara politisi dengan pejabat birokrasi, dan hubungan tersebut dapat memperkuat pelaksanaan fungsi birokrasi.

Dengan demikian, birokrasi sebenarnya memiliki sumber daya menjadi kekuatan politik untuk mempengaruhi jalannya kekuasaan. Karena bersentuhan langsung dengan wilayah politik, maka tidak jarang birokrasi terjebak dalam politik praktis.

Keterlibatan dalam politik adalah hak setiap warga negara, namun sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), birokrasi harus menghindari keterlibatan pada politik praktis, sehingga birokrasi dapat memaksimalkan fungsi dan peranya dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif. Namun, seringkali birokrasi digunakan sebagai alat untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Martini dalam (Djamal, 2018) berpendapat politisasi birokrasi berarti membuat agar organisasi birokrasi bekerja dan berbuat (patuh dan taat) sesuai dengan kepentingan politik yang berkuasa. Politisasi birokrasi berada didua sisi; berasal dari sisi partai politik yang mengintervensi birokrasi atau dari eksekutif itu sendiri yang mempolitisasi birokrasi untuk kepentingan (kekuasaan) sendiri.

Konsekuensi utama, dari pentingnya birokrat dalam kampanye pemilihan adalah bahwa mereka memberikan keuntungan kepada kepala pemerintahan daerah (petahana) dalam upaya mereka untuk terpilih kembali dalam pemilihan periode berikutnya (Aspinall & Berenschot, 2019). Menurut (Ristian, 2016) petahana memiliki akses untuk memanfaatkan birokrasi dalam pertarungan pilkada. Walaupun tidak secara langsung dan terbuka birokrasi digunakan sebagai alat untuk menarik suara. Hal ini bisa dilihat dari gejala-gejala mulai dari penggunaan fasilitas negara, mobilisasi ASN, kompensasi jabatan, komersialisasi jabatan, rekrutmen pegawai negeri baru, sampai pencopotan (depromosi). Bahwa birokrasi mempunyai peran besar dalam proses pemilu dan pilkada, suara ASN sangat strategis dalam melakukan mobilisasi masyarakat dan sangat rentan untuk dipolitisai oleh pejabat berwenang khususnya petahana atau pejabat lain yang mempunyai kepentingan maju dalam momentum pemilu atau pilkada (Gunanto, 2020).

Ada beberapa bentuk kekuatan politik birokrasi dalam mendukung kandidat petahana, antara lain: jaringan yang luas dan system organisasi yang masif, akses terhadap penguasaan sumber daya, instrument komunikasi pemerintah, pelaksana kebijakan publik dan representasi kepemimpinan politik. Birokrasi memiliki sistem organisasi yang kuat dan terstruktur. Setiap pegawai dituntut loyal terhadap atasannya sehingga pola-pola patrimonial bekerja cukup kuat dalam sistem birokrasi (Irfan, 2018).

Berdasarkan penelitian (Djamal, 2018) dalam kemenangan calon walikota petahana pada pilkada Kota Ternate tahun 2015 dipengaruhi faktor politisasi birokrasi yang dilakukan elit birokrasi. Berperan sebagai tim strategis dan tim lapangan yang melakukan sosialisasi, konsolidasi, mobilisasi dan pengamanan dukungan. Politisasi birokrasi ini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: *pertama*, berperan sebagai sumber pendanaan dan pembiayaan politik. *Kedua*, sebagai tim sukses birokrasi melakukan kerja-kerja pemenangan. *Ketiga*, pemanfaatan program dinas.

Ada sebuah spekulasi politik dan kekuasaan yang diharapkan dari ASN yang memberikan dukungan terhadap kandidat dalam pilkada yaitu akan meningkatkan karir di birokrasi ketika calon yang didukung menang. Pada satu sisi ASN diharapkan bersikap professional, akan tetapi dalam perjalanan karirnya, karir ASN sangat ditentukan oleh pejabat Pembina ASN, dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota.

2.4 Ormas Sebagai Kekuatan Politik

Bagi kelompok masyarakat tertentu menyalurkan kepentingannya adalah salahsatu cara untuk mendukung agar sistem politik dapat berlangsung. Kesadaran berpartisipasi dalam menyalurkan tuntutan tersebut adalah dalam rangka menciptakan keseimbangan dalam sebuah sistem politik. Menurut (Asrinaldi, 2014) cara yang efektif bagi kelompok itu adalah dengan melembagakan kepentingan tersebut dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan (organisasi kemasyarakatan).

Berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Salah satu fenomena yang menarik untuk dicermati adalah peran ormas dalam pelaksanaan pilkada yang sering dimanfaatkan oleh pelaku politik praktis. Mengingat ormas-ormas besar memiliki sekian banyak anggota dan berpotensi mendulang dukungan suara bagi calon kepala daerah. Selain itu, restu dari tokoh ormas terhadap calon kepala daerah juga memiliki pengaruh yang cukup besar.

Sikap ormas dalam pilkada berkaitan dengan pendidikan dan wawasan politik bagi masyarakat, Pahittiartik menyatakan paling tidaka ada empat kecenderungan sikap ormas dalam dinamika pilkada. Ini juga erat kaitanya

dalam menentukan bagaimana model transformasi informasi, persepsi dan opini dari ormas kepada masyarakat (Zeliana.dkk, 2021).

Pertama, pemimpin ormas akan berharap mendukung salah satu calon kepala daerah. Pada titik ini, ormas akan mengerahkan segala sumberdaya, mulai dari menggalang atnesi masa, mempengaruhi atnesi masyarakat dan aneka negosiasi guna mensukseskan jagoanya. *Kedua*, pimpinan ormas akan bersikap diam dan apatis dengan perkembangan politik di daerah. Sikap ini selanjutnya akan disebut apolitis. Apabila ormas mengambil sikap ini, maka ketidakterlibatan pada kubu politik manapun akan menjaga independensi dari kepentingan politik jangka pendek. Kegiatan yang dilakukan sejatinya dalam rangka tujuan fundamental ormas. Disisi lain, terkadang dukungan politik dibutuhkan guna mempermudah pelaksanaan kegiatan ormas. *Ketiga*, ormas dapat bersikap posisi ganda. Sikap ini mengharuskan pimpinan ormas mampu mencitrakan diri sebagai ormas yang tidak menolak pasangan calon tertentu dan tidak secara tegas mendukung. Dalam posisi ini ormas bisa berperan guna memperoleh keuntungan dari beberapa calon yang potensial. *Keempat*, pimpinan ormas harus bersikap kritis dan konstruktif. Ini berarti ormas harus bersikap kritis terhadap semua calon. Posisi ini mengharuskan ormas untuk bersikap jeli dan cermat dalam melihat jejak karir para calon. Sehingga memberikan keuntungan bagi ormas untuk bermain pada level *high politic* agar tidak terjebak pada politik praktis.

Pada dasarnya, apapun sikap yang diambil oleh ormas harus diniatkan bagi kepentingan dan kemajuan rakyat. Terlebih lagi, jika sikap tersebut niscaya melahirkan kemandirian pemilih yang berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Ormas harus memberikan fatwa berupa landasan normative dan etik untuk menyokong kearah kemandirian tersebut.

Dalam taraf tertentu Aspinal dan Berenschot menjelaskan, politisi mengandalkan organisasi masyarakat sebagai jejaring sosial sebagaimana

untuk alasan mereka membentuk tim sukses yaitu mereka mengupayakan akses kepada para pemilih dalam kondisi dimana mereka tidak dapat bergantung pada partai politik untuk melakukan tugas ini. Ketika para politisi mengandalkan jejaring sosial yang telah ada beserta para pemimpin dari jejaring tersebut, mereka mengalih-tugaskan tugas-tugas mereka terkait dengan pemilihan, dan menggunakan mereka sebagai jalan pintas untuk menjangkau massa, ketimbang mengandalkan tim sukses yang mereka bangun dari nol (Aspinall & Berenschot, 2019:185). Namun, ada juga alasan yang lebih dalam dari para kandidat mengapa mereka beralih ke organisasi-organisasi kemasyarakatan dan para pemimpin mereka, yaitu alasan-alasan yang mengarah ke jantung politik klientalisme yang dibayang-bayangi masalah kepercayaan. Jika kandidat tidak dapat memantau kepatuhan seorang pemilih, maka yang dapat dilakukan adalah memantau kepatuhan sekelompok pemilih, terutama jika kelompok tersebut terorganisir secara teritorial.

2.5 Kelompok Ekonomi Sebagai Kekuatan Politik

Cukong politik atau sering juga disebut sebagai investor atau sponsor politik telah lama menjadi isu yang hadir dalam kontestasi politik dalam skala local maupun nasional. Keterlibatan pengusaha dan perusahaannya dalam pemilihan umum bukanlah fenomena unik di Indonesia saja. Menurut (Assyaukanie, 2018) di berbagai negara, transaksi-transaksi dibalik layar seperti ini selalu terjadi, termasuk di Amerika Serikat, Eropa dan di negara-negara manapun yang menerapkan system demokrasi. Keterlibatan pengusaha dalam pemilihan sering disebut dengan istilah “donokrasi”. Donokrasi menjelaskan keterlibatan erat antara pemberi dana kampanye (donor) dengan calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah.

Yahya Muhaimin (Hanafi & Azmy, 2018) menyebutnya sebagai *Client Businessman*, dimana pengusaha-pengusaha bekerja dengan dukungan dan protekasi dari jaringan kekuasaan pemerintahan. Para pengusaha memiliki

patron dalam kelompok kekuasaan politik birokrasi dan merak sangat tergantung kepada konsesi dan monopoli yang diberikan oleh pemerintah. Mereka lahir diluar aparat birokrasi dan biasanya juga masih termasuk ke dalam keluarga elit yang sedang berkuasa.

Pelaksanaan pilkada secara tidak langsung telah menuntut kandidat yang berkontestasi untuk memiliki modalitas ekonomi yang besar. Perusahaan sebagai organisasi bisnis tidak bisa berjalan sendiri. Perusahaan masih dan akan selalu tergantung kepada banyak pihak. Perusahaan membutuhkan konsumen untuk membeli produknya, perusahaan membutuhkan pemasok barang, perusahaan juga membutuhkan peran pemerintah sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bisnis (Situmorang, 2010). Disisi lain, para politikus juga membutuhkan peran pebisnis dalam aktivitas politik yang mereka lakukan. Partai politik tempat mereka bernaung juga membutuhkan dana untuk menjalankan kegiatan partai politik tersebut. Kebutuhan dana yang besar tidak dapat hanya ditopang oleh donatur dari internal partai, apalagi dalam menghadapi pemilu, pilpres dan pilkada. Oleh karena itu sumbangan dana dari pihak luar sangat dibutuhkan dan biasanya yang mampu menyumbang dana dalam jumlah banyak adalah pebisnis yang memang kaya raya.

Dalam konteks pengusaha sebagai kekuatan politik, maka bahan yang dimiliki oleh pengusaha adalah berupa bahan finansial (keuangan) dan jaringan (*linkage*) terhadap sejumlah hal, seperti aktor politik dan juga sumber daya alam. Pengusaha merupakan orang yang dapat menyatukan ketiga komponen tersebut, yaitu modal, sumber daya alam dan manusia atau tenaga kerja. Pentingnya peran pengusaha, maka pengusaha pun mempunyai kepentingan untuk berdekatan dengan pemerintah (Hanafi & Azmy, 2018). Pengusaha tidak dapat terlepas dari dunia politik, karena akan selalu berhubungan dengan pemerintah dalam menyalurkan perdagangan dan usahanya. Baik terkait kebijakan, maupun implementasi dari

dagangan/usahanya. Atas dasar hal ini, menjadikan pengusaha dan politik akan menjadi dua hal yang selalu berkaitan.

Mekanisme pertama yang mengaitkan perekonomian yang dikontrol secara terkonsentrasi dengan relasi yang lebih intim antara politik dan bisnis menyangkut sifat pendanaan kampanye. Di daerah-daerah di mana sebagian besar kekayaan terkonsentrasi hanya di beberapa sector dan aktor yang terbatas, jabatan politik lebih mungkin direbut hanya oleh segelintir elit yang dominan. Sementara di daerah-daerah dengan cakupan kegiatan ekonomi yang lebih luas, termasuk di banyak daerah kandidat dapat mengandalkan lingkaran pendanaan yang relatif lebih luas (cara-cara alternatif untuk menghubungkannya dengan para pemilih).

Lebih jauh lagi, dalam ekonomi yang bergantung pada negara dengan sedikit industri, sulit untuk menemukan pendanaan yang tidak menuntut keuntungan pribadi. Sebagian besar kegiatan ekonomi (mulai dari konstruksi, perkebunan, pertambangan hingga restoran) terkait dengan anggaran pemerintah atau dengan persetujuan pemerintah di lokasi-lokasi tersebut. akibatnya, para pengusaha lokal itu memiliki insentif yang kuat untuk memanfaatkan sumbangan mereka dalam kampanye para kandidat untuk memajukan kepentingan ekonomi mereka sendiri. Para pendana tersebut tidak tertarik untuk mempromosikan aturan hukum, prosedur tender yang transparan atau sejenisnya. Mereka lebih tertarik pada melemahkan daripada memperkuat prosedur yang telah ditetapkan pemerintah (Aspinall & Berenschot, 2019). Sebenarnya, pelaku bisnis sering memilih untuk menghindari hubungan dekat dengan satu kandidat dan lebih memilih untuk memberikan kontribusi dana kampanye kepada semua calon yang dapat dipilih untuk memastikan bahwa siapapun yang menang mereka akan tetap mendapatkan keuntungan.

2.6 Relasi Kuasa Petahana dan Kekuatan Politik

Petahana atau *incumbent* merupakan istilah yang kerap digunakan dalam kontestasi pilkada ketika orang yang sedang memegang jabatan kepala daerah ikut dalam pemilihan agar terpilih kembali dalam jabatan itu. Petahana sering ikut dalam pilkada meskipun tidak dalam satu paket yang sama. Artinya, mereka maju kembali dengan wakil kepala daerah yang berbeda. Menurut (Suwardi & Haryanto, 2018) penyebutan pasangan petahana dirasa lebih pas dibandingkan penyebutan pasangan *incumbent* dalam kosa kata Bahasa Inggris. Pasangan petahana untuk menandai keberadaan peserta atau kontestan pilkada yang pada saat dilangsungkannya pilkada baru saja usai menjabat atau masih dalam masa jabatan sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah. Penyebutan petahana berlaku untuk calon kepala daerah dan wakil calon wakil kepala daerah.

Dalam penelitian ini, petahana didefinisikan sebagai kandidat yang menjabat atau baru selesai menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah sebelumnya dan mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di daerah yang sama, baik dengan pasangan yang sama dengan periode sebelumnya atau pun dengan pasangan yang berbeda. Petahana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pasangan Raden Adipati Surya dan Ali Rahman. Raden Adipati Surya merupakan Bupati Way Kanan periode 2016-2021 yang kembali menjadi kontestan pada pilkada tahun 2020 yang lalu sebagai calon Bupati Way Kanan.

Petahana dianggap sebagai calon yang lebih diuntungkan dibandingkan calon yang bukan petahana. Karena mereka memiliki jaringan pribadi yang kuat, akses langsung dalam perumusan kebijakan lokal dan penganggaran daerah. Menurut (Faisal & Tanjung, 2021) seorang petahana memiliki modal dalam proses pemilihan kepala daerah. Modal teritorial untuk mensosialisasikan dirinya, merupakan modal yang mencakup lingkungan RT/RW, desa, kecamatan yang masih berada dibawah administrasi daerahnya. Kekuasaan petahana lainnya berupa kuantitas sumber daya

manusia didaerahnya, ASN yang berada dibawah kendali seorang petahana merupakan modal untuk meningkatkan perolehan suara. Wewenang dalam melakukan promosi, mutase dan demosi merupakan modal mempengaruhi ASN dalam proses pilkada. Modal anggaran dan kegiatan sering disusupi dengan kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah sering digunakan seorang petahana dalam proses pilkada.

Sedangkan menurut (Suwardi & Haryanto, 2018) *political personal* merupakan tolak ukur kekuatan politik kontestan terdiri dari *popularity*, *acceptability* dan *electability*. Posisi jabatan yang ada pada pasangan petahana lebih diuntungkan. Selama kurang lebih lima tahun menjalankan pemerintahan, petahana memiliki kesempatan luas untuk memperkenalkan diri mereka kepada seluruh masyarakat dan memungkinkan dirinya untuk dapat dikenal secara luas. *Acceptability* dipahami sebagai penilaian atas kemampuan dari kontestan untuk menduduki jabatan yang sedang dikontestasikan. Menjelang akhir masa jabatannya kepala daerah yang hendak maju dalam pilkada akan semakin gencar meyakinkan masyarakat bahwa diri pantas untuk menduduki jabatan kepala daerah pada periode berikutnya. Sedangkan aspek *electability* atau keterpilihan merupakan *resultante* dari berbagai variable lainnya. Secara teoritis sikap politik dan pilihan politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai variable. Namun demikian secara teoritis pemilih memiliki penilaian atas diri kontestan positif apabila mengenalinya (*popularity*). Setelah kontestan dipandang *acceptable* oleh yang mengenali berujung pada pilihan. Memiliki elektabilitas yang baik.

Petahana kembali berpartisipasi dalam pilkada didasarkan pada analisis dan kalkulasi peluang kemenangan. Menurut (Fadli & Dkk, 2018) peluang tersebut dapat diukur melalui kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan, capaian program pembangunan, politisasi birokrasi, sampai pada kesiapan dari aspek *financial* petahana sebagai konsekuensi tingginya biaya demokrasi langsung pada momen pilkada. Selain itu, pragmatisme partai

politik untuk tidak mengambil resiko dengan mendukung kandidat yang berpeluang kalah adalah faktor yang tidak dapat dikecualikan. Dengan adanya berbagai peluang bagi petahana, untuk terpilih kembali, sering kali petahana salah menggunakan kewenangan yang dimilikinya sehingga berujung pada proses hukum. Penggunaan fasilitas negara merupakan modus paling sering digunakan petahana pada saat pelaksanaan pilkada. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada petahana, memungkinkan bagi petahana untuk membujuk, mempengaruhi dan bahkan memerintah para bawahannya untuk berpihak dan memberikan dukungan untuk kepentingan petahana.

Besarnya kekuatan politik petahana bergantung kepada kemampuan petahana dalam mempengaruhi kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk mendukung dan mewujudkan keinginannya dalam memenangkan pemilihan. Dalam upayanya ini, tidak jarang petahana melakukan praktik-praktik patronase dan klientalisme. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh tentang hubungan atau relasi antara kandidat petahana dengan kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya. Hubungan antara petahana dan kekuatan-kekuatan politik yang mendukungnya dapat diidentifikasi melalui beberapa hal:

2.6.1 Sifat Hubungannya

Keputusan kekuatan-kekuatan politik untuk mendukung kandidat dalam pilkada tentunya didasari oleh adanya hubungan atau relasi antara kandidat dengan kekuatan-kekuatan politik. Partisipasi kekuatan-kekuatan politik adalah salah satu aspek penting dalam suatu demokrasi. Partisipasi politik menjadi ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi kekuatan-kekuatan politik dalam mendukung atau memenangkan kandidat dalam pilkada dapat dilihat dari sifat dukungan yang diberikan, yaitu:

a. Sukarela

Sukarela merupakan perbuatan ikhlas melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan atau pamrih. Sukarela adalah kehendak sendiri (tidak karena diwajibkan) berupa dukungan sukarela yang diberikan oleh kekuatan politik dalam mendukung kandidat saat pilkada. Dalam artian kekuatan-kekuatan politik menyumbangkan dirinya untuk bekerja dengan tenaga, dana dan pikiran mereka tanpa berharap keuntungan materi apapun.

Orang yang ikut kegiatan sukarela dinamakan sukarelawan atau sering disebut relawan. Istilah ini digunakan untuk menandai prinsip keterlibatan politik secara aktif oleh kaum intelektual. Bukan hanya pemikiran, tetapi juga usaha untuk membela dan mewujudkan pemikiran tersebut (Arianto, 2014). Dalam kontestasi pilkada, kehadiran relawan bukan karena daya tarik partai politik melainkan kepada politik nilai yang melampaui kepentingan partai. Bahkan, kehadiran relawan politik dapat disinergikan dengan tim sukses pemenangan kandidat karena fungsi mobilisasi yang lebih masif.

b. Mobilisasi

Mobilisasi sering digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan tentang peran serta yang bersifat paksaan, keharusan, atau kewajiban. Dalam politik, mobilisasi disebut sebagai aktivitas atau kegiatan politik yang bukan keinginan sendiri tetapi atas dorongan dan ajakan dari pihak lain dalam arti dikerahkan secara sengaja. Dalam konteks pilkada misalnya, ketika suatu komunitas mewajibkan anggotanya untuk mencoblos kandidat tertentu, maka secara substansial hal tersebut dapat dikatakan sebagai mobilisasi. Di Indonesia mobilisasi tidak sukar untuk dilaksanakan, karena masyarakatnya berbudaya paternalistik.

Menurut Stefano dalam (Elwan, 2019) mobilisasi politik dikategorikan dalam 2 bentuk, yaitu mobilisasi langsung dan mobilisasi tidak langsung. Mobilisasi langsung adalah kegiatan mobilisasi dalam bentuk pengerahan terhadap pemilih agar melakukan tindakan politik sebagaimana yang dikehendaki. Mobilisasi politik tidak langsung merupakan kegiatan mobilisasi dalam bentuk pemengaruhan cara pikir atau cara pandang pemilih, sehingga pemilih akan mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk keputusan politik pemilih.

Kapasitas mobilisasi yang lemah dari partai-partai politik telah menumbuhkembangkan politisasi yang kuat dari berbagai jejaring sosial non-partai dalam membentuk kekuatan politiknya pada waktu pemilihan. Berhubung kandidat perlu mencari tempat lain untuk mengembangkan sarana agar dapat terhubung dengan para pemilih, mereka mencoba memasukkan berbagai jaringan sosial dan kekuatan politik kedalam tim dan kegiatan kampanye mereka.

2.6.2 Patronase

Patronase merupakan bagian dari politik uang yang dimainkan oleh para kandidat untuk memenangkan pemilihan. Namun, istilah politik uang telah secara luas digunakan untuk menggambarkan praktek-praktek penggunaan uang dalam pemilihan umum. Politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan uang, hadiah, atau barang kepada pemilih agar dicoblos pada saat pemungutan suara berlangsung. Sejumlah studi merujuk (Arianto, 2016) politik uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk. *Pertama*, politik uang yang secara spesifik menunjuk pada strategi ritel jual beli suara (*vote buying*). *Kedua*, strategi politik uang grosiran dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik, seperti

bantuan sosial atau hibah dana *pork barrel* untuk kepentingan elektoral.

Konsep patronase didefinisikan sebagai relasi dua arah ketika seorang yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan pada orang lain yang memiliki status sosial ekonomi yang lebih rendah (klien) yang memberikan dukungan dan bantuan kepada patron (Scott, 1972). Adapun pengertian dari patronase jika merujuk pada Shefter dalam (Anggoro, 2019), sebagai pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka. Sedangkan (Muller, 2014) mendefinisikan patronase sebagai penggunaan sumber daya publik dalam pertukaran partikularistik dan langsung antara klien dan partai politik atau fungsionaris partai.

Menurut Aspinal dan Sukmajati dalam (Anggoro, 2019), variasi patronase terdiri atas *Pertama*, pembelian suara (*vote buying*), dapat diartikan sebagai distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari sebelum pemilu yang disertai harapan yang implisit bahwa penerima akan membalasnya dengan memberikan suaranya bagi si pemberi. *Kedua*, pemberian-pemberian pribadi (*individual gift*), praktik ini dilakukan saat bertemu dengan pemilih, baik saat bertemu kunjungan ke rumah-rumah atau saat kegiatan kampanye. Pemberian tersebut terkadang disamarkan dengan pemberian sebagai kenang-kenangan. *Ketiga*, pelayanan dan aktifitas (*services and activities*), seperti pemberian uang tunai, kandidat sering kali menyediakan atau membiayai aktivitas yang sangat umum seperti kampanye pada acara perayaan oleh komunitas tertentu. *Keempat*, barang-barang

kelompok (*club good*), di mana bentuk patronase yang diberikan untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu. Seperti kandidat yang memberikan sumbangan pembangunan atau renovasi infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti pembangunan mushola, jembatan dan lain sebagainya. *Kelima*, proyek gentong babi (*pork barrel project*) bentuk patronase yang sedikit berbeda, yaitu proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk daerah geografis tertentu.

Aspinal dan Berenschot (2019:35) menggunakan istilah patronase untuk menggambarkan barang-barang material dan manfaat-manfaat lainnya yang didistribusikan oleh para politisi dengan cara yang sesuai dengan dukungan pada pemilu. Oleh karena itu, patronase bisa saja merentang dari sebuah penyediaan jabatan dalam pemerintah hingga ke akses pada program bantuan yang dapat dilimpahkan pada individu-individu atau kelompok (barang bersama) untuk merujuk pada hadiah-hadiah yang diberikan. Sebuah demokrasi patronase adalah demokrasi dimana para politisi menggunakan distribusi patronase sebagai cara untuk menggali dukungan pada pemilihan umum atau pilkada.

2.6.3 Klientalisme

Klientalisme merupakan fenomena yang masih melekat dalam praktik demokrasi di Indonesia yang secara khusus lebih lekat dengan konteks elektoral dan kedaerahan. Secara garis besar, klientalisme dapat dipahami sebagai relasi kuasa antara aktor politik yang memberikan sesuatu (patron) non-programatik dengan pihak yang menerima (klien) yang didasari oleh pemberian loyalitas oleh penerima (paternalistik). Untuk membedakannya dengan suap, Hicken berargumen bahwa suap merujuk pada transaksi yang hanya terjadi dalam suatu waktu sementara klientalisme merujuk pada hubungan transaksional yang diinteraksikan atau berlanjut.

Klientalisme politik terjadi ketika para pemilih, para penggiat kampanye, atau aktor-aktor lainnya menyediakan dukungan elektoral bagi para politisi dengan imbalan berupa bantuan atau manfaat material (Syauket, 2021). Dalam praktiknya, para kandidat menggunakan metode klientalistik untuk memenangkan pilkada dengan membagi-bagikan bantuan, barang-barang, atau uang tunai kepada pemilih baik individu maupun kelompok-kelompok kecil. Mereka melakukan itu dengan harapan akan menerima imbalan atau balasan berupa pemberian dukungan dalam bentuk suara kepada kandidat saat pemungutan suara berlangsung.

Menurut Hicken dalam (Aspinall & Berenschot, 2019) esensi dari klientalistik adalah *quod pro quo*, sesuatu untuk sesuatu atau sering kali digambarkan dalam pustaka keilmuan, “pertukaran yang kontingen”. Unsur resiprositas ini membedakan klientalisme dari politik programatik, dimana para kandidat atau partai politik menawarkan kebijakan-kebijakan yang luas yang memberikan manfaat bagi banyak orang-bahkan bagi seluruh populasi tanpa memperhatikan dukungan politik yang mereka berikan pada saat pemilihan berlangsung.

Praktik klientalisme dalam pilkada, kebanyakan kandidat membentuk organisasi-organisasi non-partai untuk menjaring suara yang dikenal dengan sebutan “tim sukses” atau “tim pemenang”, yang sering kali memanfaatkan kader partai namun lebih sering bergantung pada tokoh atau pemuka masyarakat dan para warga yang tidak terafiliasi dengan partai. Hal tersebut terjadi karena, rapuhnya hubungan antara kandidat dengan partai pengusung atau koalisi partai yang mengusungnya dalam pilkada. Di sisi lain peran partai-partai politik sering kali tereduksi menjadi sekedar sebagai penjaga tol, menawarkan pencalonan pada bakal calon namun

hampir tidak memberikan bantuan apa pun dalam kampanye para calon atau untuk menertibkan atau mengarahkan para calon ketika mereka sudah terpilih (Aspinall & Berenschot, 2019). Sering kali, kandidat juga tidak menampilkan identitas partai pendukungnya agar dapat memperoleh suara dari pemilih partai yang tidak bergabung dengan partainya.

Klientalisme sendiri merupakan praktik politik yang paling tradisional di dunia, tetapi praktik politik ini telah berkembang menjadi cara berpolitik modern sejalan dengan munculnya varian pertukaran politik (*pork-barrel*) yang terjadi hampir diseluruh belahan dunia. Klientalisme hadir seperti gurita yang menggerogoti demokrasi di Indonesia. Klientalisme dalam pilkada beroperasi dengan cara pemberian uang, pemberian barang, pemberian jabatan dan pemberian proyek pemerintah yang dilakukan tidak hanya menjaga relasi mutualisme atau resiprokal antara patron dengan klien, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan mereka atas berbagai sumberdaya ekonomi dan politik.

2.6.4 Broker

Broker atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut pialang adalah individu atau perusahaan yang bertindak sebagai perantara antara investor dan pertukaran efek. Broker dalam dunia politik sering dikaitkan dengan pola klientalisme atau pola-pola patronase yang berbicara bagaimana pola hubungan patron dan klien tersebut karena broker diartikan sebagai penghubung atau orang ketiga antara patron dan klien. Dalam konteks pemilihan umum, broker bertindak sebagai perantara antara kandidat dan pemilih terkhusus dalam praktik patronase. Pola patronase dapat melibatkan pihak ketiga (*broker*) atau tim kampanye sebagai perantara untuk mendistribusikan barang-barang atau material patronase.

Broker juga dikaitkan dengan politik transaksional yang dibina melalui orang tengah atau perantara dalam broker politik. Lebih lanjut, (Soetanto, 2012) broker ini memainkan peran sebagai penghubung antara orang ramai dengan pemerintah atau pihak yang berkuasa. Mereka mempunyai hubungan erat dengan penguasa dan akan berusaha membantu orang ramai yang meminta tolong. Mereka yang sudah dibantu akan memberikan dukungan sebagai balasan dan menganggap pemimpin tersebut memiliki daya pertolongan. dalam hal ini mereka telah membentuk ikatan kedekatan, dan ikatan tersebut akan berakhir setelah ketika mereka tidak dibantu lagi.

Dalam sejarahnya, menurut Ronald P. Arcer dalam (Radiallah, 2019) broker digambarkan sebagai awal dari transisi tradisional menuju perilaku broker yang mereka gunakan untuk meraih keuntungan dan menghidupi kehidupan mereka. Arcer berasumsi, para broker dan klientalisme yang terjadi di Kolombia adalah orang-orang yang berasal dari kaum pedesaan yang masih berperilaku tradisional, dimana mereka bertindak menjadi broker agar mendapat keuntungan secara materi dari jasa yang mereka berikan kepada pengguna (kandidat).

Fenomena *broker* politik di Indonesia sudah ada sejak penyelenggaraan pemilu orde baru kemudian jenisnya semakin berkembang sejak adanya perubahan sistem pemilu pada pemilu era reformasi. Menurut (Aspinall, 2014) dengan berkejolaknya reformasi nilai-nilai demokrasi Kembali dihidupkan sehingga pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah mulai dilakukan secara langsung atau dipilih langsung oleh rakyat. Aspinall juga menjelaskan bahwa ternyata broker-broker politik dapat berkhianat kapan saja ketika ada calon yang dapat memberikan keuntungan yang lebih kepadanya. Dalam artian broker akan melihat dari segi

materi calon tersebut apakah calon tersebut memiliki amunisi materi yang cukup dan dapat menguntungkan mereka, kalau tidak maka para broker bisa saja akan berkhianat kepada calon lain yang lebih menguntungkan.

Selain menjelaskan perkembangan broker serta penghianatan-penghianatan yang dilakukan broker Aspinall juga merinci broker kedalam tiga bagian. *Pertama*, broker aktivis, yang mendukung kandidat berdasarkan politik, etnis, agama atau komitmen lainnya, broker jenis ini menggunakan apa yang mereka miliki dan dapat mempengaruhi orang lain. *Kedua*, broker klientalis, yang menginginkan hubungan jangka panjang dengan kandidat atau broker senior, dengan tujuan menerima hadiah dimasa depan, broker jenis ini akan lebih loyal kepada atasannya karena ada yang diharapkan dalam masa jangka panjang. *Ketiga*, broker oportunistis, yang mencari keuntungan jangka pendek selama kampanye, biasanya mereka hanya bekerja pada saat kampanye dan pasca dari itu mereka tidak ikut campur lagi apa yang dilakukan oleh kandidat yang menggunakan jasanya.

Biasanya, tokoh-tokoh masyarakat memainkan peran penting sebagai broker dalam kampanye kandidat. Pada saat pemilihan, para kandidat akan dikepung oleh berbagai jenis broker yang berjanji akan memberikan suara baginya sebagai balasan atas uang “operasional” atau “transportasi” yang telah mereka dapatkan dari sang calon. Hal ini dapat menjadi bisnis yang menguntungkan bagi beberapa pemuka masyarakat.

Kekuatan-kekuatan politik yang memiliki relasi dengan petahana tentunya melihat dari modalitas yang dimiliki oleh petahana. Dalam bentuk yang sederhana relasi kekuatan politik dengan petahana perlu modal untuk menjalin kerjasama. Dalam berbagai literasi, modalitas calon terdiri atas

modal politik, modal ekonomi dan modal sosial. Jika mencermati prosedur maupun proses pemilihan di dalam pemilukada secara langsung, secara metafora kita bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat balapan mobil. Pasangan calon kepala daerah itu berkemungkinan memenangkan pemilukada secara langsung manakalah memiliki tiga kombinasi di dalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang piawai, dan bensin yang memadai. Secara konseptual metafora itu terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam pemilukada (Pasangan et al., 2012). Ketiga modal yang dimaksud adalah modal politik (*political capital*), modal sosial, (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*), ketiga modal ini dapat mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari pemilih. Semakin besar kekuatan modal yang diakumulasi oleh kandidat, maka semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh dukungan.

Pengertian modal politik dalam ilmu sosial memang masih terus dipertajam dan publikasi mengenai modal politik ini jauh lebih sedikit dibanding publikasi mengenai modal simbolik (*symbolic capital*), modal sosial (*social capital*), modal budaya (*cultural capital*) maupun modal ekonomi (*economic capital*) (Baharuddin & Purwaningsih, 2017). Modal politik dapat diartikan sebagai dukungan politik yang diterima kandidat, dalam konteks pilkada partai politik menjadi modal politik yang utama sebagai organisasi politik yang memiliki legitimasi untuk mengusung kandidat maju dalam kontestasi pilkada. Oleh karena itu, kandidat akan berusaha sebanyak mungkin menggalang koalisi partai politik yang memiliki kursi dan suara di DPRD hasil pemilihan legislatif sebagai syarat dukungan dalam mendaftar sebagai peserta pemilu, namun, dukungan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD juga tetap digalang, karena meskipun tidak dapat digunakan sebagai syarat dukungan, namun keberadaan partai politik non parlemen juga memiliki kepengurusan yang dapat digunakan sebagai mesin pemenangan. Dalam hal ini, pihak yang memiliki modal politik relatif besar dibandingkan dengan pesaingnya akan diuntungkan. Begitu juga

sebaliknya, pihak yang memiliki modal politik jauh lebih kecil akan kesulitan untuk bisa bersaing apalagi memenangkan kompetisi politik.

Namun dalam kontestasi pilkada sebagai arena kompetisi antar kandidat calon kepala daerah, fungsi partai politik sebagai alat mobilisasi dukungan relatif kecil, sehingga para kandidat harus memanfaatkan sebanyak mungkin jejaring sosial yang ada di masyarakat untuk memperoleh dukungan karena kompetisi lebih besar terhadap pengaruh figure atau sosok kandidat itu sendiri. Sehingga, kekuatan modal politik harus didukung oleh kekuatan modal sosial. Modal sosial adalah segala jenis hubungan sebagai sumber daya untuk penentuan kedudukan social. Menurut Bourdieu modal sosial ini sejatinya merupakan hubungan sosial bernilai antar orang. Hal tersebut bisa dicontohkan sebagian masyarakat yang berinteraksi antar kelas dalam lapisan sosial masyarakat. Artinya dalam hal ini interaksi sosial antar kelas adalah menentukan posisi kelasnya tersendiri. Modal sosial juga dapat dipahami suatu jaringan sosial yang dimiliki oleh seorang aktor dalam hubungannya dengan pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan. Modal sosial menjadi lebih kuat apabila jaringan seorang aktor luas baik melalui individu ataupun melalui kelompok-kelompok tertentu. Analisis modal sosial yang dimiliki oleh Raden Adipati Surya didasarkan pada partai politik dan organisasi keagamaan yang melekat pada dirinya.

Pada perspektif modal ekonomi ini sebagaimana dalam teori Bourdieu disebut sebagai modal yang mudah dikonversikan dalam bentuk modal lainnya. Modal dimaksud bisa berupa finansial atau sarana produksi. Dalam Pemilu pada umumnya peserta pemilu membutuhkan sosialisasi dan kampanye untuk menyampaikan dan mengenalkan visi-misi peserta pemilu. Modal ekonomi yaitu kekayaan yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menunjang aspek ekonomi. Contohnya seperti uang, alat-alat produksi seperti mesin, tanah ataupun buruh (Lagabuana et al., 2021). Mengutip dari buku (Tawakal Baharudin, 2007:43), pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang

disimbolkan dengan uang/mata uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Kampanye menjadi bagian penting dalam siklus pemilihan karena menjadi momentum pasangan calon menggalang dukungan dari pemilih. Pelaksanaan pilkada secara tidak langsung telah menuntut kandidat yang berkontestasi untuk memiliki modalitas ekonomi yang besar. Dalam upayanya untuk menggalang dan memobilisasi dukungan politik pemilih, seringkali kandidat merayu pemilih dengan memberikan barang-barang seperti mug, kalender, kaos, brosur, pamphlet, dan bahkan amplop berisi uang sebagai ganti rugi atas partisipasi pemilih dalam meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kampanye kandidat.

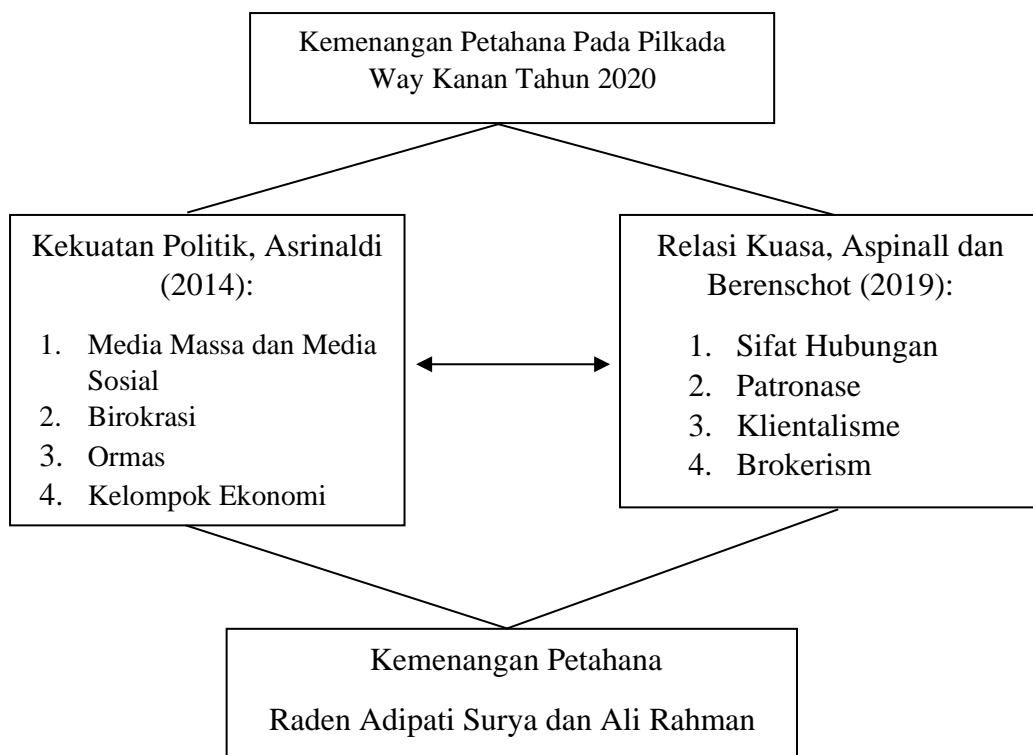
Keikutsertaan petahana sebagai kontestan dalam pilkada memang menjadi fenomena yang menarik perhatian. Meskipun di beberapa daerah, petahana tidak selalu bisa mengulang kesuksesannya untuk memenangkan pilkada. Namun setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan bahwa keberadaannya sebagai kontestan pilkada penting untuk diperhitungkan. *Pertama*, sebagai pemegang kendali lembaga eksekutif petahana memiliki wewenang penuh menggunakan program-program pembangunan untuk membangun citra diri. Secara tidak langsung mereka memiliki rentang waktu dan kesempatan lebih luas berkampanye. Cukup dengan mengklaim bahwa keberhasilan pembangunan adalah buah kerja kerasnya sebagai kepala daerah, maka simpati lebih mudah diraih. *Kedua*, dari sisi popularitas tentu saja sosok petahana lebih dikenal dari pada calon lain. Jika calon yang akan mengajukan diri dalam Pilkada perlu biaya dan energi lebih besar untuk sekedar memperkenalkan diri kepada masyarakat, maka petahana tidak perlu melakukannya. Sebab dengan jabatannya dia sudah otomatis mendapatkan popularitas di kalangan masyarakat.

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Kekuatan Politik pada Kemenangan Petahana dalam Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020” dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kemenangan petahana dalam Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020. Petahana yang memperoleh kemenangan adalah pasangan nomor urut 2. Raden Adipati Surya dan Ali Rahman.

Penelitian ini menggunakan teori kekuatan politik dari Asrinaldi (2014), untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan politik yang ada dalam Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020 dan teori relasi kuasa dari Aspinall dan Berenschot (2019) untuk mengetahui hubungan atau relasi kekuatan-kekuatan politik dengan kandidat petahana dalam kemenangan Raden Adipati Surya dan Ali Rahman.

Berikut bagan kerangka pikir penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mana peneliti akan mendeskripsikan penelitian ini secara menyeluruh dengan menganalisis fenomena, baik yang diperoleh dari berbagai wawancara maupun dari dokumentasi. Penelitian ini berusaha mendeskripsikan tentang Kemenangan Petahana Pada Pilkada Way Kanan Tahun 2020.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia. Pada pendekatan ini, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan (Suyito & Sodik, 2015).

Alasan penulis memilih metode kualitatif karena memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi dalam hal ini adalah kekuatan politik dan calon petahana, dikarenakan kajiannya adalah fenomena yang selalulu mengalami perubahan (dinamis), yang sulit diukur dengan menggunakan angka-angka maka penelitian ini membutuhkan analisis yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada kuantifikasi data.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kekuatan politik pada kemenangan petahana dalam Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020 dengan menggunakan teori dari Asrinaldi (2014) untuk mengidentifikasi kekuatan politik apa saja yang ada pada Pemilihan Bupati Way Kanan Tahun 2020 dan bagaimana kekuatan politik tersebut berperan dalam kemenangan petahana. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus pertama adalah menganalisis bagaimana pengaruh kekuatan-kekuatan politik seperti partai politik, birokrasi, media massa, organisasi kemasyarakatan, dan kelompok ekonomi terhadap keterlibatannya dalam memenangkan petahana.
2. Fokus kedua adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemenangan petahana.

3.3 Informan

Informan adalah orang yang memiliki informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti (Nurdin & Hartati, 2019). Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.

Dalam perspektif fenomenologis, *versthen* sangat diperlukan peneliti didalam melakukan penelitian. *Versthen* adalah cara memahami situasi yang ditemukan dilapangan (Fuad, 2014:9). Penelitian ini memfokuskan informan pada para aktor kekuatan politik. Untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian ini, maka informan yang akan dipilih adalah memiliki kriteria sebagai berikut antara lain yaitu informan merupakan orang yang faham tentang kepemiluan, terlibat dalam pelaksanaan pemilu, merupakan bagian dari aktor kekuatan politik yang diteliti, tim sukses dan akademisi. Peneliti memilih beberapa informan yang dipilih yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Nama Informan	Alasan Memilih Informan
1	Bawaslu Way Kanan	Yessi Karnainsyah	Mengetahui dinamika pilgub Way Kanan
2	PD Pemuda Muhammadiyah	Sigit Dwi Suwardi	Mengetahui kekuatan politik terhadap petahana
3	KPU Way Kanan	Tri Sudarto	Mengetahui dinamika pilgub Way Kanan
4	Radar Way Kanan	Oksi Ajuan Firnando	Mengetahui kekuatan politik terhadap petahana
5	DPD IWO Way Kanan	Akuntar	Mengetahui kekuatan politik terhadap petahana
6	Kadin Way Kanan	Hamim Akbar	Mengetahui kekuatan politik terhadap petahana
7	Tim Pemenangan ARJUNA	Firmansyah	Mengetahui kekuatan politik terhadap petahana
8	Akademisi STISIP Binamarta	Adie Nurjana Resma	Mengetahui kekuatan politik terhadap petahana

Sumber: Diolah Peneliti, 2022.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data sangat penting dalam penelitian dan lebih lanjut digunakan penelitian untuk memperoleh data-data penelitian sehingga meminimalakan waktu dan biaya. Sumber daya dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer. Dalam penelitian ini juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang sebenarnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan nantinya. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu (Hardani et al., 2020). Wawancara ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara merupakan bagian penting dalam penelitian kualitatif sehingga peneliti dapat memperoleh data dari berbagai informan secara langsung.

Terkait dengan penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan menggunakan wawancara semistruktur dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya.

2. Observasi

Pengamatan atau observasi merupakan suatu unsur penting dalam penelitian kualitatif, observasi dalam konsep yang sederhana adalah sebuah proses atau kegiatan awal yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengetahui kondisi realitas lapangan penelitian. Menurut (Suyito & Sodik, 2015) observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data.

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati fenomena-fenomena yang terjadi dilokasi penelitian. Melalui teknik ini diharapkan akan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai objek yang diamati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan berwujud rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data tersebut dapat dikumpulkan dengan berbagai macam cara (observasi, wawancara dan dokumentasi) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), dalam analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisi.

Menurut Miles dan Huberman dalam (Nurdin & Hartati, 2019) analisis data kualitatif adalah mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan terperinci. Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan dari data yang dikumpulkan. Menurut (Sugiyono, 2013) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan (Suyito & Sodik, 2015).

3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisi ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dari proses analisis data. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian (Suyito &

Sodik, 2015). Sehingga kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih jelas dan terperinci.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2013). Teknik keabsahan data adalah ketetapan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Untuk menguji validitas data yang diperoleh dari informan penelitian, peneliti menggunakan teknik uji kredibilitas yang berupa triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi bukanlah alat atau strategi validasi, namun alternative bagi validasi.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah teknik triangulasi yang dikembangkan oleh Denzin (dalam Maelong 2010) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Triangulasi sumber peneliti menggunakan berbagai sumber seperti dokumen, arsip dan berita online.
2. Triangulasi metode yakni menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan yang berkaitan dengan kemenangan petahana pada Pilkada Kabupaten Way Kanan Tahun 2020.

VI. SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua kekuatan politik, baik media massa dan media sosial, birokrasi, organisasi masyarakat, dan kelompok ekonomi memiliki pengaruh masing-masing terhadap keberhasilan petahana dalam memenangkan Pilbub Way Kanan Tahun 2020. *Pertama*, Dukungan yang diberikan oleh media massa terhadap petahana bersifat patronase dalam bentuk pelayanan dan aktifitas (*services and activities*), seperti pemberian uang tunai, petahana sering kali menyediakan atau membiayai aktivitas yang sangat umum seperti kampanye pada acara yang diselenggarakan oleh media massa melalui proposal. Peran media massa sedikit tersisihkan dengan adanya media sosial dikarenakan media sosial lebih hemat anggaran dan memungkinkan kandidat berinteraksi dengan masyarakat pengguna media sosial. Penggunaan media sosial cukup berpengaruh terhadap kemenangan petahana, karena adanya pembatasan berkerumunya massa dalam satu tempat saat kampanye tatap muka. *Kedua*, adanya hubungan patron-klien dimana petahana memiliki status sosial ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan perlindungan kepada ASN sekaligus menginterfensi mereka agar memberikan dukungannya politiknya kepada petahana. Hal itu, tidak dapat dipungkiri adanya politisasi birokrasi dan dibuktikan dengan adanya temuan dari Bawaslu Way kanan terhadap ketidak netralan ASN dalam

- Pilbub Way Kanan Tahun 2020. *Ketiga*, pengaruh organisasi masyarakat terhadap kemenangan petahana bertindak sebagai broker yang menghubungkan petahana dengan anggota ormas yang nantinya, dukungan tersebut diganti dengan kebijakan yang menguntungkan terhadap ormas tersebut. *Keempat*, peran kekuatan modalitas dalam pemenangan petahana di Pilbub Way Kanan didominasi oleh modal ekonomi, dikarenakan petahana merupakan seorang pengusaha yang memiliki cukup modal *financial*. Modal ekonomi petahana mampu diakumulasi dengan baik, sehingga modal politik dan modal sosial dapat diperoleh.
2. Dalam setiap pilkada, kehadiran petahana lebih diunggulkan karena memiliki kelebihan dibandingkan calon yang bukan petahana. Dalam Pilbub Way Kanan Tahun 2020, terdapat tiga faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan petahana dalam meraih kemenangan dengan persentase yang cukup tinggi. *Pertama*, faktor pandemi covid-19 melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan terhadap 8000 KK (Kepala keluarga) secara langsung oleh Bupati Raden Adipati Surya di 14 Kecamatan secara bertahap sejak bulan Juni 2020 sampai September 2020 yang mana waktunya berdekatan dengan pelaksanaan pilkada. *Kedua*, faktor internal yakni besarnya kekuatan politik dari Raden Adipati Surya. Mulai dari rekam jejak yang baik, besarnya dukungan dari partai politik, pengaruh dari wakil bupati Ali Rahman dan juga maraknya relawan politik yang mendukung. *Ketiga*, faktor eksternal yang perlu disadari bahwa lawan petahana dalam Pilbub Way Kanan Tahun 2020 cukup lemah dari berbagai sisi, mulai dari tidak memiliki kedekatan dengan masyarakat, minimnya dukungan partai dan tidak solidnya antar pasangan dan tim pemenangan yang berdampak pada minimnya perolehan suara pada saat pemungutan suara.
 3. Besarnya kekuatan politik yang dimiliki oleh petahana Raden Adipati Surya dan Ali Rahman tidak terlepas dari modal yang dimiliki pasangan ini. Modal tersebut terdiri dari modal politik, modal sosial dan modal ekonomi yang memang lebih unggul jika dibandingkan dengan lawannya. Modal ekonomi Raden Adipati Surya memobilisasi kekuatan-kekuatan

politik yang ada, dimulai dari memobilisasi partai politik sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk mengusung calon dalam pilkada, sehingga calon-calon lain yang potensial dapat diredam karena tidak mampu memperoleh dukungan dari partai politik. Hal tersebut yang kemudian membuat kekuatan politik yang lain tidak ada pilihan selain mendukung petahana.

4. Kekuatan-kekuatan politik di Kabupaten Way Kanan perlu diperluas, memperluas kekuatan politik sama halnya dengan memperluas ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan. Dengan cara ini, kekuatan-kekuatan politik berusaha memerankan fungsi agregasi dan artikulasi kepentingan untuk diteruskan kepada pemerintah. Semakin banyak kekuatan politik didalam sistem politik akan membantu proses konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung. Jika partai politik bertambah, kelompok kepentingan semakin banyak, kelas menengah semakin berperan di semua bidang kehidupan masyarakat, dan media massa berpihak pada masyarakat, maka semakin terbuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses politik dan tidak hanya berlangsung ketika ada pemilu saja. Dan yang paling penting adalah masing-masing kekuatan politik harus menyadari posisinya dalam sistem politik. Dengan demikian setiap kekuatan politik akan mampu menilai kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya dalam membentuk masyarakat sipil yang merupakan arena berlangsungnya konsolidasi demokrasi. Harus disadari peningkatan kualitas demokrasi di dalam sistem politik di Indonesia ditentukan oleh kekuatan politik. Ini karena kekuatan politik berperan memberikan alternatif agar konsolidasi demokrasi dan pendalaman demokrasi ditingkat lokal dapat berlangsung.

6.2 Saran

1. Kemenangan petahana dalam pilkada dapat dilihat sebagai kuatnya kepercayaan publik terhadap kinerja petahana, namun tidak semua petahana dengan kinerja yang baik dapat kembali memenangkan pilkada. Memiliki kinerja yang cukup baik dan bisa dikatakan membanggakan

nyatanya tidak mampu memberikan sebuah kemenangan jika tidak diekspose sejak awal sehingga masyarakat kurang bisa mengetahuinya. Sehingga bagi petahana hendaknya aktif menyampaikan keberhasilan program-programnya baik melalui *branding* di media massa maupun media sosial agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

2. Bagi calon yang menantang petahana hendaknya mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki petahana untuk kemudian ditawarkan solusi perbaikan atau perubahan untuk meraih simpati dan dukungan dari masyarakat. Namun tentunya hal itu harus dibarengan dengan modalitas yang kuat, baik modal ekonomi, modal politik dan modal sosial untuk dapat memobilisasi kekuatan politik yang besar untuk mengungguli petahana pada saat pemilihan berlangsung.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak meneliti tentang kekuatan politik dalam pilkada hendaknya memperhatikan relawan politik yang kini tengah berkembang menjadi tren dalam setiap pemilihan yang juga menjadi kekuatan politik tersendiri karena memiliki pengaruh terhadap keputusan-keputusan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andala, S. (2020). *Alasan PDIP Mengalihkan Dukungan di Pilkada Way Kanan*. m.lampos.co. <https://m.lampost.co/berita-alasan-pdip-mengalihkan-dukungan-di-pilkada-way-kanan.html>
- Anggoro, T. (2019). Politik Patronase dan Klientelisme Purnawirawan Tni Pada Pemilu Legislatif. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.24905/jip.v4i1.1242>
- Arafat, G. Y., & Rahmah, N. A. (2019). Media Politik: Sarana Pendongkrak Elektabilitas Sebagai Strategi Pemenangan Pemilu. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(1), 91. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i1.2994>
- Arianto, B. (2014). *Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014*. 18(November), 130–146.
- Arianto, B. (2016). Fenomena Relawan Politik dalam Kontestasi Presidensial 2014. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 130. <https://doi.org/10.22146/jsp.13128>
- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545–570. <https://doi.org/10.1080/14672715.2014.960706>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy For Sale*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Asrinaldi. (2014). *Kekuatan Kekuatan Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2021). *Kabupaten Way Kanan dalam Angka 2021*. Badan Pusat Statistik (BPS) Way Kanan.
- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205–237. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4176>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- dutalampung.com. (2019). *Pemkab Way kanan Anggarkan Dana Hibah Rp17 M Dalam APBDP | Duta Lampung Online*. <https://dutalampung.com/pemkab-way-kanan->

anggarkan-dana-hibah-rp17-m-dalam-apbdp/

- Elwan, L. O. M. (2019). Modal dan Dampak Mobilisasi Politik Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus: Desa Bontomatinggi Kabupaten Maros Sulawesi Selatan Tahun 2016). *Journal Publicuho*, 1(4), 1. <https://doi.org/10.35817/jpu.v1i4.6312>
- Fathurrahman, F. (2020). *ASN Kerap Dijadikan Modal Politik Petahana*. <https://www.validnews.id/>. <https://www.validnews.id/nasional/ASN-Kerap-Dijadikan-Modal-Politik-Petahana-iDS>
- Fermana, R. A., & Zetra, A. (2022). Relasi Media Massa Dan Politik Pada Pemilihan Umum Presiden 2019. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.32370>
- Fuad, A. (2014). *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Graha Ilmu.
- gantaneews.co. (2020). *Pasangan Petahana Raden Adipati Surya-Edward Anthony Semakin Jaya, Pasangan Juprius-Rina Marlina Sepi Peminat | Gantanews*. <https://gantaneews.co/>. <https://gantaneews.co/pasangan-petahana-raden-adipati-surya-edward-anthony-semakin-jaya-pasangan-juprius-rina-marlina-sepi-peminat/>
- Gantanews.com. (2022). *Adipati hadir Doa dan Tasyakuran Relawan Adipati lagi | Gantanews*. <https://gantaneews.co/>. <https://gantaneews.co/adipati-hadiri-doa-dan-tasyakuran-relawan-adipati-lagi/>
- Hajad, V. (2018). MEDIA DAN POLITIK (Mencari Independensi Media Dalam Pemberitaan Politik). *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1–10. <https://doi.org/10.35308/source.v2i2.295>
- Hanafie, H.&Azmy A.N.(2018). *Kekuatan-Kekuatan Politik*. Depok: Rajawali Pers
- Handoko, E. (2020). *Kupas Tuntas - Ini Alasan Raden Adipati Surya Pilih Ali Rahman Sebagai Wakilnya di Pilkada Way Kanan*. kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2020/09/20/ini-alasan-raden-adipati-surya-pilih-ali-rahman-sebagai-wakilnya-di-pilkada-way-kanan>
- Hertanto, & Sulaiman, N. A. (2013). Koalisi Transaksional Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Lampung. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 12(2).
- Juniardi. (2020). *Lima Partai Non Parlemen Dukung Raden Adipati Surya dan Edward Anthony - Sinarlampung*. sinarlampung.co. <https://sinarlampung.co/lima-partai-non-parlemen-dukung-raden-adipati-surya-dan-edward-anthony/>
- KPU. (2015). *Pilkada Kabupaten Way Kanan*. pilkada2015.kpu.go.idida2015.kpu.go.id. pilkada2015.kpu.go.id/hasil/waykanan
- KPURI. (2014). Modul Dana Kampanye. In *Buku Saku: Dana Kampanye*.
- Kupastuntas.co. (2018). *Kupas Tuntas - Adipati-Edward Fokus Bangun Infrastruktur dan Peningkatan Pelayanan Publik*. <https://www.kupastuntas.co/2018/03/19/adipati-edward-fokus-bangun-infrastruktur-dan-peningkatan-pelayanan-publik/>

- Kurniawan, R. C., Rahmatunnisa, M., & Agustino, L. (2017). Vote Buying In Lampung Local Election. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 33(2), 359. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v33i2.2664>
- Lagabuana, B. F., Sukri, S., & Haryanto, H. (2021). Bertahan dan Menang: Strategi dan Modal Politik Sri Rahmi dalam Pemilihan Legislatif 2004-2019 di Sulawesi Selatan. *Jurnal Transformative*, 7(2), 157–173. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.02.1>
- Lampung, B. (2010). *Hasil Rekapitulasi Pilkada Way Kanan Pasangan Bustami Menang / Hari ini Berita Lampung*. Berita Lampung Online. <http://berita-lampung.blogspot.com/2010/07/hasil-rekapitulasi-pilkada-way-kanan.html>
- mui-lampung.or.id. (2019). *Wabup Tanggamus Didaulat Menjadi Ketua Angkatan MKNU Angkatan 4 Lampung*. <http://mui-lampung.or.id/>. <http://mui-lampung.or.id/2019/10/12/wabup-tanggamus-didaulat-menjadi-ketua-angkatan-mknu-angkatan-4-lampung/>
- Pasangan, K., Lomban, M., Maria, S., & Pantouw, I. (2012). *Modalitas dalam kontestasi politik*. 1–38.
- pilkada2020.kpu.go.id. (2020). *Info Publik Pilkada 2020*. pilkada2020.kpu.go.id. <https://pilkada2020.kpu.go.id/#/pkwkk/tungsur/1808>
- Radiallah, M. K. (2019). *Broker Dalam Pilkada: Kajian Terhadap Kemenangan Fadly Amran dan Asrul Dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018* [Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/47038>
- Rekanza, H. (2020). *Dianggap Sukses, PAN Lampung Restui Adipati Surya Maju Lagi di Pilbup Way Kanan*. <https://lampungpro.co/>. <https://lampungpro.co/post/25657/dianggap-sukses-pan-lampung-restui-adipati-surya-maju-lagi-di-pilbup-way-kanan>
- Rizky Gerry Supit, A., & Eka Enats Wuryana, A. (2021). *Media Sosial Sebagai Media Politik Dalam Pilkada(Studi Kasus Pemanfaatan Media Sosial Dalam Pilkada Kabupaten Suka Bumi 2020)*. 6(3), 314–331.
- Sandi. (2020). *Dua Paslon Pilkada Way Kanan Mandiri*. <https://realitalampung.com/2020/11/01/dua-paslon-pilkada-way-kanan-mandiri/>
- Saputra, Y., & Sotta, S. (2020). *Pilkada: Puluhan istri petahana jadi calon kepala daerah, dinasti politik semakin mengakar? - BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia>. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55121695>
- Soetanto, H. S. (2012). *Politik Transaksional Dalam Gabungan Partai Islam Pada Pilihan Raya Kepala Daerah (Pilkada) Di Lampung, Indonesia*. 1–23.
- Suhaili. (2020). *Raden Adipati Bagikan BST APBD Tahap Pertama di Blambangan Umpu*. [japos.co](https://www.japos.co). <https://www.japos.co/2020/06/27/raden-adipati-bagikan-bst-apbd-tahap-pertama-di-blambangan-umpu/>
- Syauket, A. (2021). *Membangun Dinasti Politik Oligarki Yang Korup (Fenomena*

Pilkada Serentak 2020). Kreasi Cendikia Pustaka.

Syobah, N. (2012). Peran Media Massa Dalam Komunikasi Politik Hj. Sy. Nurul Syobah*. *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, 1, 13–24.

Wisesa, I. G. P. (2014). Modal sosial, pemilu kepala daerah, independen 1. *Journal of Politic and Government Studies*, 3(3), 366-375., 012, 1–8.

Zeliana, Y., Sulastri, E., Sumarno, & Andriyani, L. (2021). Strategi Politik Pemenangan Petahana Pasangan Hj . Airin Rachmi Diany Dan Benyamin Davnie. *Independen (Jurnal Politik Indonesia Global)*, 2(1). <https://doi.org/10.24853/independen.2.1.9-20>